

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PEMANTAPAN SIKAP TOLERANSI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN GUNA KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

Yunardi

Kolonel Inf NRP 11930073800170

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **"Pemantapan Sikap Toleransi dan Wawasan Kebangsaan Guna Ketahanan Nasional"**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor Kep 16 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXIII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXIII tahun 2022 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Marsekal Muda TNI Arif Widiyanto, S.A.B., M.Tr (Han) dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

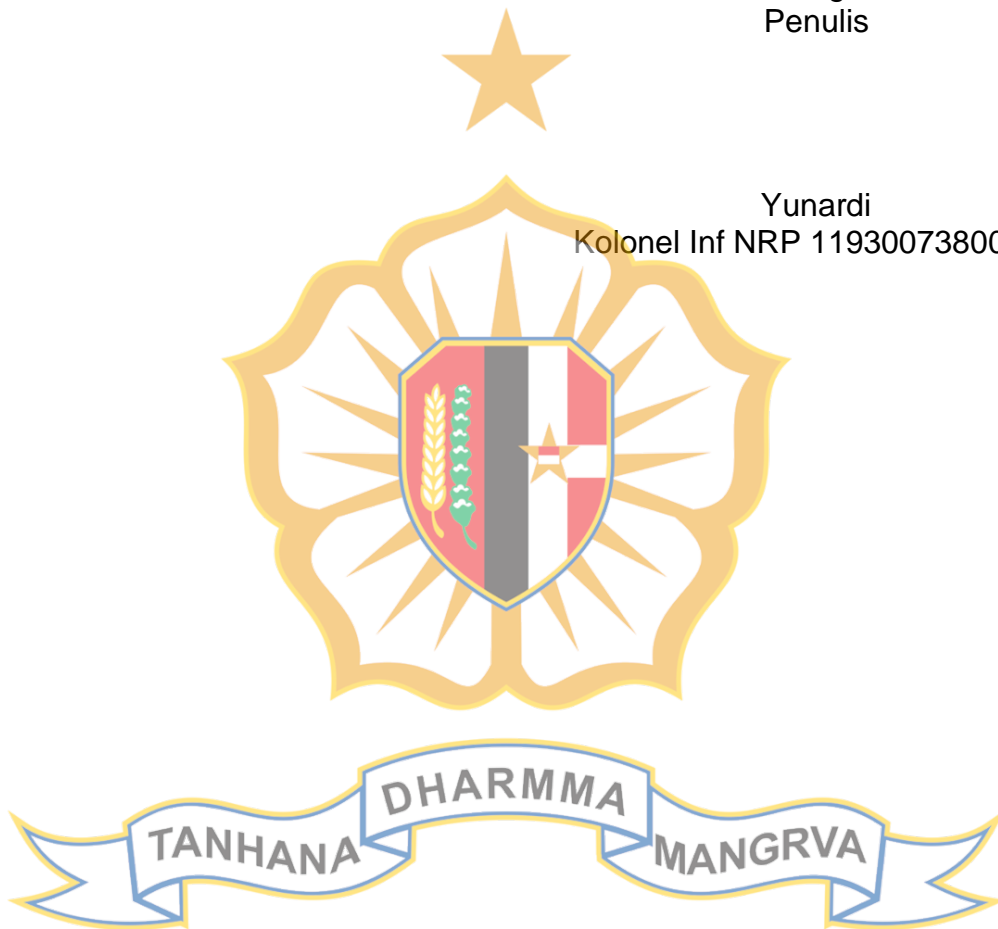
Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2022
Penulis

Yunardi
Kolonel Inf NRP 11930073800170



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunardi
Pangkat : Kolonel Inf
Jabatan : Pamen Denma Mabasad
Instansi : TNI AD
Alamat : Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2022
Penulis Taskap



Yunardi
Kolonel Inf NRP 11930073800170

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang Bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Yunardi
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke
LXIII Tahun 2022
Judul Taskap : PEMANTAPAN SIKAP TOLERANSI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN GUNA KETAHANAN NASIONAL

Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhanas RI Nomor 02 tahun 2022, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

“” coret yang tidak diperlukan.

Jakarta, Agustus 2022

Tutor



Arif Widiyanto, S.A.B., M.Tr (Han)
Marsekal Muda TNI

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

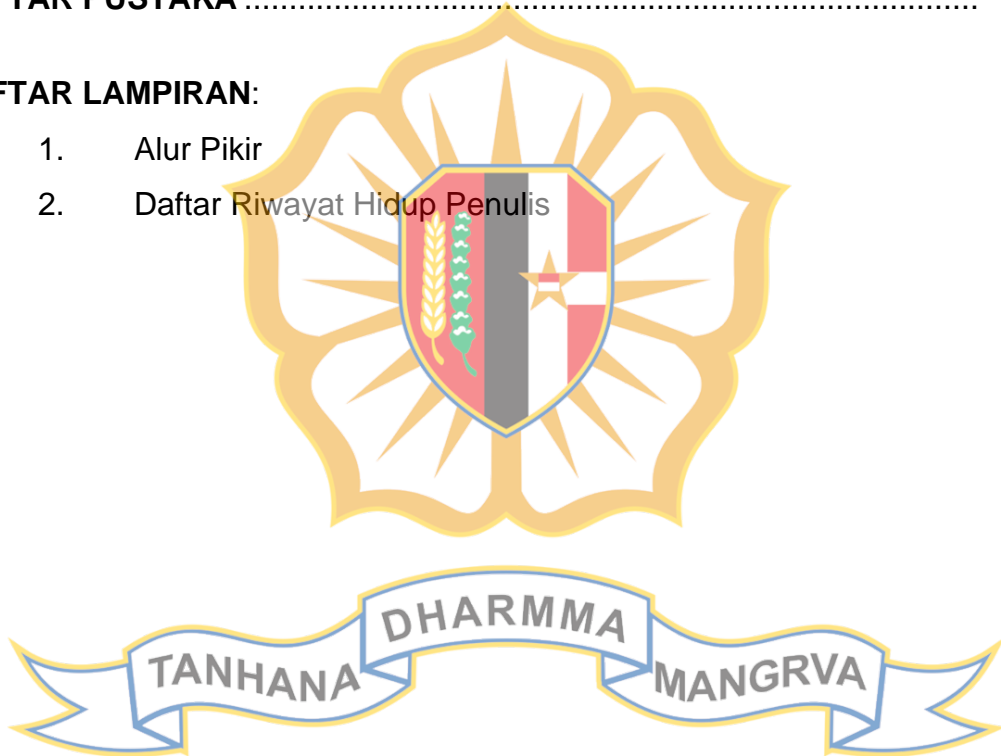
DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan masalah	4
3. Maksud dan Tujuan.....	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan	5
6. Pengertian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
7. Umum	8
8. Peraturan Perundang-Undangan	9
9. Kerangka Teoritis	11
10. Data dan Fakta.....	14
11. Lingkungan Strategis	21
BAB III PEMBAHASAN	29
12. Umum	29
13. Analisis pementapan pemahaman masyarakat bangsa Indonesia terhadap toleransi maupun wawasan kebangsaan.....	30

14.	Analisis pemantapan pendekatan multikulturalisme dalam mengatasi permasalahan ketahanan nasional.....	36
15.	Analisis pemantapan peran dari komponen bangsa dalam implementasi toleransi dan wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat.....	43
BAB IV	PENUTUP	56
16.	Simpulan	56
17.	Rekomendasi	58
	DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Alur Pikir
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis

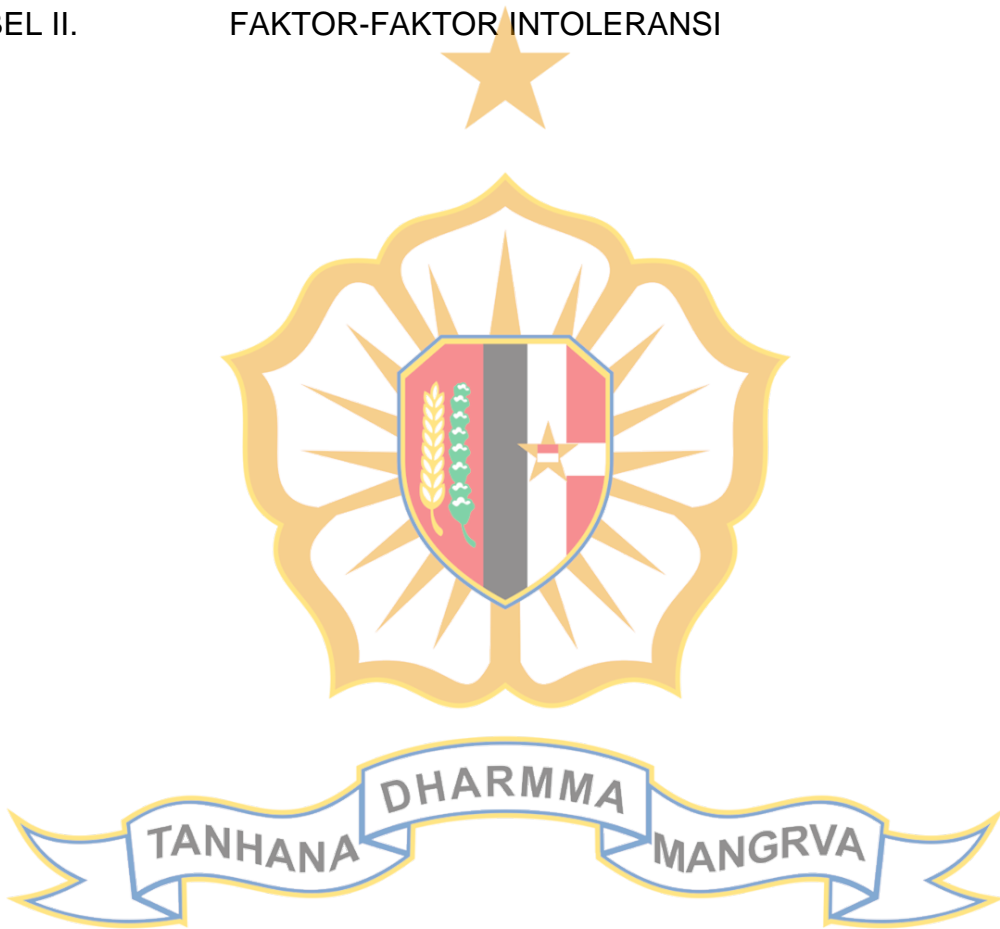


LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TABEL

TABEL I. PETA TEMUAN SURVEI OPINI DAN SIKAP INTOLERAN DI
INDONESIA

TABEL II. FAKTOR-FAKTOR INTOLERANSI



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR. 1 GRAFIK TINGKAT TOLERANSI DI INDONESIA
GAMBAR. 2 PERBANDINGAN SUMBER KONFLIK TAHUN 2021



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Perkembangan lingkungan strategis global telah memberikan dampak yang cukup mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat dunia, baik dampak yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu dampak positif antara lain melahirkan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dunia itu sendiri. Sedangkan dampak negatif salah satunya mudahnya paham-paham ideologi negara lain yang bertentangan dengan paham yang dianut oleh suatu negara. Contohnya adalah isu-isu berkembangnya intoleransi, yang banyak dilakukan oleh pemerintahan suatu negara terhadap pemeluk agama minoritas dan dianggap dapat menimbulkan permasalahan, khususnya Islam. Negara-negara tersebut membatasi praktek-praktek keagamaan masyarakat minoritas. Misalnya Rusia dan Perancis, kedua negara ini telah membatasi lebih dari 200 kali mengeluarkan kebijakan pembatasan praktek keagamaan di negaranya. Contohnya memberikan hukuman individu bagi yang melanggar kebijakan menutup wajah di tempat umum maupun gedung-gedung pemerintahan di Perancis. Selanjutnya di Jerman pada tahun 2015 lalu, dimana Kepolisian Jerman menyerbu *Islamic Cultural Center* di Bremen dengan menuduh bahwa kelompok ini sebagai pendukung kelompok "Salafi" dan tempat tersebut dijadikan sebagai penyebaran senjata dalam melakukan teror di Jerman. Demikian juga di Hongaria, dimana pemerintahnya mengeluhkan bahwa imigran dari agama tertentu telah memenuhi negaranya. Intoleransi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, khususnya dalam kebebasan beragama tidak selalu berbentuk dalam kekerasan fisik, namun juga melalui pernyataan yang merendahkan serta diskriminatif¹. Bagi bangsa Indonesia yang kehidupan bermasyarakatnya bersifat multikultur akan menjadikan suatu ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan.

¹ Kumparannews.com. Intoleransi Agama Jadi Wabah Global, Tak Cuma di Indonesia, diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/intoleransi-agama-jadi-wabah-global-tak-cuma-di-indonesia/2> pada 20 Maret 2022

Timbulnya intoleransi yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pemahaman wawasan kebangsaan yang belum sepenuhnya membumi di seluruh masyarakat/penduduk warga negara Indonesia, menjadikan bangsa ini mudah di pecah belah dan terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang sengaja ingin merusak kedamaian. Hal ini tidak dapat dipungkiri, bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dengan berbagai suku bangsa, agama, ras, budaya, adat istiadat dan golongan sangat rentan timbulnya konflik-konflik yang dapat mengganggu sikap toleransi warga masyarakatnya. Terjadinya konflik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada terganggunya Ketahanan Nasional bangsa Indonesia. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh dinamika global kontemporer sampai dengan pandemi Covid 19 yang telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu yang bisa wujudkan ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah adanya toleransi dan sikap serta pemahaman wawasan kebangsaan dihadapkan kepada kemajemukan bangsa Indonesia.

Dengan pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan tersebut mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan, baik kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sehingga bangsa Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sebagai salah satu kekuatan menangkal berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Masih adanya sikap intoleransi dan terdegradasinya wawasan kebangsaan yang terjadi saat ini akibat dari perkembangan teknologi yang terus berkembang tanpa mengenal batas negara.

Salah satu contoh adalah ketersinggungan mahasiswa Papua di Malang yang dilatarbelakangi oleh pengecaman penandatanganan *New York Agreement* antara Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962². Peristiwa ini telah memicu berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Papua di berbagai daerah sampai dengan di wilayah Papua sendiri. Apabila hal ini terus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi satu perpecahan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

² Aji, Aditya Purnama, 2021. Bingkai Pemberitaan Tirto.id dan Suara.com tentang Konflik Antara Mahasiswa Papua dan Masyarakat lokal di Surabaya tahun 2019. Jurnal Audiens Vo. 2 No. 1, Maret 2021.

Dalam aspek intoleransi agama, contohnya peristiwa yang terjadi di Padang dimana adanya peraturan daerah yang mewajibkan kepada seluruh peserta didik (SD, SMP, SLTA sederajat) menggunakan pakaian muslim/muslimah (berjilbab) bagi yang beragama Islam dan bagi non muslim dianjurkan menyesuaikan dengan memakai baju kurung bagi perempuan dan memakai celana panjang bagi laki-laki³. Berikutnya adalah intoleransi budaya, seperti peristiwa pembuangan sesajen di Lumajang yang telah melukai tradisi serta perasaan banyak warga lereng Gunung Semeru dan menyatakan bahwa sesajen tersebut merupakan penyebab terjadinya erupsi Semeru⁴. Disamping itu dalam aspek intoleransi etika sosial seperti adanya ujaran kebencian penggunaan bahasa daerah tertentu yang dilontarkan oleh seorang wakil rakyat dan adanya ujaran yang kurang pantas terhadap salah satu daerah terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, dimana fenomena ini telah memicu terjadinya keresahan masyarakat. Peristiwa-peristiwa lainnya seperti perkelahian dan perselisihan di kalangan generasi muda, serta masih banyaknya kasus-kasus kekerasan atas nama golongan dan kelompok tertentu di Indonesia, yang sama sekali bertentangan dengan karakter maupun kultur bangsa Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa pokok persoalan yaitu masih terbatasnya pemahaman masyarakat bangsa Indonesia terhadap makna toleransi dan wawasan kebangsaan, belum optimalnya pola pendekatan multikulturalisme dalam mengatasi permasalahan ketahanan nasional, dan belum optimalnya peran dari penyelenggara negara serta aparat keamanan (TNI dan Polri) dalam implementasi toleransi dan wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat didukung komponen bangsa lainnya. Melalui teori *pentahelix*, teori koherensi, teori persepsi dan teori pendidikan karakter, maka pementapan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan guna ketahanan nasional dapat diketahui berbagai kekurangan yang ada selama ini serta upaya-upaya strategis yang perlu dirintis dalam rangka meminimalisir berbagai kekurangan tersebut atau bahkan

³ Cnnindonesia.com. Polemik Wajib Jilbab Padang, Perda Intoleran Didesak Dicabut, diunduh melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128063022-20-599326/polemik-wajib-jilbab-padang-perda-intoleran-didesak-dicabut> pada 10 Februari 2022

⁴ Cnnindonesia.com. Pria Tendang Sesajen Semeru Resahkan Warga, Kini Diburu Aparat, diunduh melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220110071518-12-744490/pria-tendang-sesajen-semeru-resahkan-warga-kini-diburu-aparat> pada 10 Februari 2022.

menghilangkan sama sekali. Oleh sebab itu, analisa deskripsi dari penulisan Taskap ini adalah kecenderungan toleransi dan wawasan kebangsaan di masa mendatang dalam tatanan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, yang diwarnai oleh berbagai proses perubahan disegala aspek kehidupan untuk mewujudkan ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah.

a. **Rumusan masalah.** Berdasarkan uraian singkat diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan taskap ini adalah : Bagaimana memantapkan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan guna ketahanan nasional ?

b. **Pertanyaan kajian.** Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana memantapkan pemahaman masyarakat bangsa Indonesia terhadap toleransi maupun wawasan kebangsaan ?
- 2) Bagaimana memantapkan pendekatan multikulturalisme dalam mengatasi permasalahan ketahanan nasional?
- 3) Bagaimana memantapkan peran dari komponen bangsa dalam implementasi toleransi dan wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat ?

3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Maksud dari penulisan taskap ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan pemantapan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan guna ketahanan nasional, serta memecahkannya persoalan tersebut.

b. **Tujuan.** Tujuan penulisan Taskap ini sebagai sumbangan pemikiran peserta kepada pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup penyusunan taskap ini dibatasi pada pembahasan terkait dengan pertanyaan kajian untuk memantapkan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan guna ketahanan nasional.

b. **Sistematika.**

1) **BAB I PENDAHULUAN.** Pada bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang pemantapan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan guna ketahanan nasional, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan serta pengertian-pengertian.

2) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab ini menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta dan lingkungan strategis yang mendukung penulisan dan informasi lainnya untuk menganalisis pada BAB III.

3) **BAB III PEMBAHASAN.** Pada bab ini merupakan analisis/pembahasan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah tertuang pada data dan fakta di bab II berdasarkan teori, referensi sampai dengan menemukan faktor penyebab dari akar masalah yang selanjutnya dirumuskan solusi pemecahannya.

4) **BAB IV PENUTUP.** Pada bab ini penulis menjelaskan tentang simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan ringkasan tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penulisan Taskap ini. Sedangkan rekomendasi merupakan saran dari penulis yang ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan yang dikaji.

5. Metode dan Pendekatan.

a. **Metode.** Penulisan dan pembahasan Taskap ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang didasarkan kepada data-data

dari hasil observasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengamatan di lapangan.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengemukakan fakta-fakta dari pengalaman selama bertugas dan pengamatan untuk memperoleh landasan ilmiah serta pemecahan pertanyaan kajian dalam perspektif yang akan datang.

6. **Pengertian.**

a. **Ancaman.** Adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa⁵.

b. **Ancaman Aktual.** Adalah ancaman nyata, berbentuk separatis bersenjata, terorisme, kelompok radikal, kelompok komunal, pencurian kekayaan alam seperti *illegal fishing*, *illegal logging* dan *illegal mining* serta bencana alam⁶.

c. **Ancaman potensial.** Adalah benih ancaman yang sewaktu-waktu dapat timbul seperti sengketa bersenjata, disintegrasi bangsa, konflik antar golongan, keresahan sosial, upaya penggantian ideologi Pancasila dan sebagainya⁷.

d. **Bela negara.** Merupakan ungkapan rasa cinta tanah air untuk mempertahankan NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebhinekaan, yakin pada Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, rela berkorban untuk nusa dan bangsa⁸.

⁵ Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 4.

⁶ Kemenhan RI, 2014. Doktrin Pertahanan Negara, h. 24

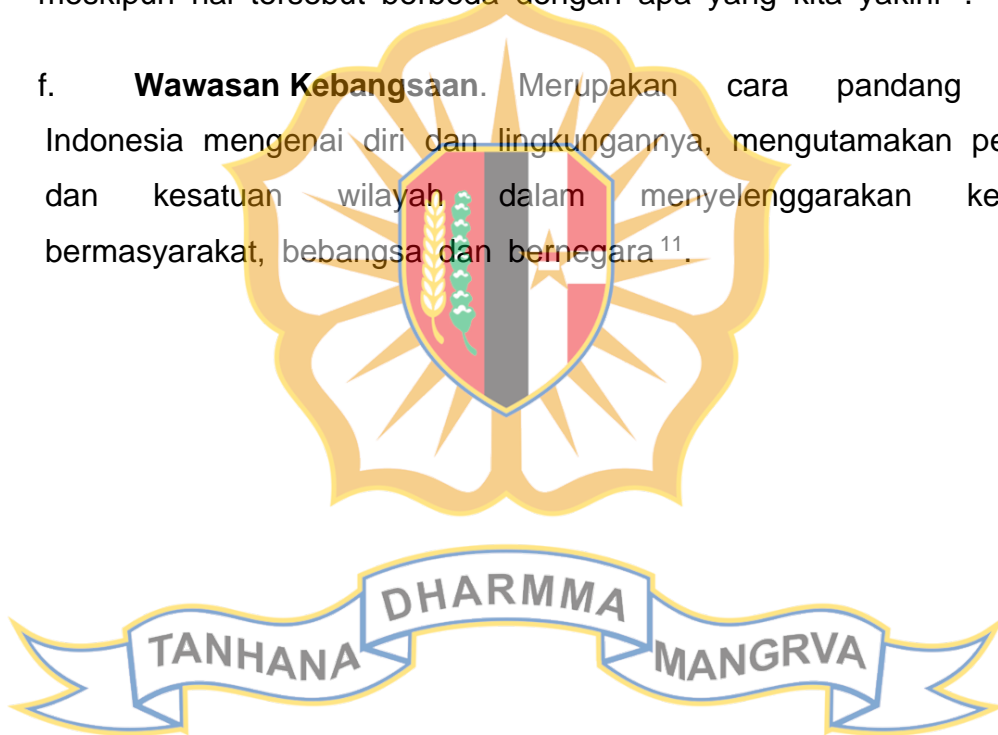
⁷ Ibid, h. 24

⁸ Ibid, h. 65

e. **Ketahanan Nasional.** Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ketahanan Nasional bangsa Indonesia ini berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ATHG tersebut⁹.

e. **Toleransi.** Merupakan sikap dalam rangka memberikan ruang dan tidak mengganggu hak orang lain dalam berkeyakinan mengekspresikan keyakinannya serta menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini¹⁰.

f. **Wawasan Kebangsaan.** Merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹¹.



⁹ Lemhannas RI, 2022. Modul Ketahanan Nasional, h. 45

¹⁰ Kemenag RI, 2019. Moderasi Agama. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, h. 44

¹¹ BPPK, 2017. Bahan Belajar Mandiri Wawasan Kebangsaan. Pusdiklat PSDM, Kemenkeu RI, h. 51

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. **Umum.** Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai tingkat heterogenitas yang tinggi, yang ditandai dengan banyaknya suku bangsa, bermacam-macam agama, beraneka ragam budaya dan adat istiadat serta terdiri dari berbagai etnis, maka sikap kebersamaan dalam perbedaan sangat dibutuhkan. Perbedaan-perbedaan yang ada tersebut sebagaimana yang dikemukakan di atas, disadari sepenuhnya oleh para pendiri bangsa. Adapun bentuk dari kesadaran ini diwujudkan dalam sebuah semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang mengandung pengertian walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan ini mengindikasikan, bahwa para pendiri bangsa “*The Founding Father*” kita sangat memahami suasana kebatinan bangsa Indonesia, yang walaupun mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun bahasa serta temperamen antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yakni bagaimana mewujudkan Indonesia Raya dikemudian hari. Rasa optimis yang begitu besar terpatri pada setiap jiwa pemimpin bangsa dan setiap individu masyarakat Indonesia, diwujudkan dengan kebulatan tekad memproklamkan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan semangat juang yang tinggi dan didorong oleh tekad yang bulat untuk lepas dari penjajah inilah bangsa Indonesia, membuktikan kepada dunia akan kehormatannya sebagai bangsa dengan mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajah untuk kembali ke bumi pertiwi. Heroik perjuangan bangsa di bawah pemimpin-pemimpin bangsa yang gagah berani membuktikan kepada generasi sekarang, bahwa Indonesia tetap tegak sebagai satu bangsa. Memperhatikan kenyataan sejarah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa peran pemimpin nasional atau masyarakat sejak awal berdirinya republik ini sangat menentukan. Dikatakan demikian, karena peran penyelenggara negara atau pemimpin nasional ini dapat menggerakkan masyarakat secara keseluruhan untuk bangkit bukan sekedar menyatakan kemerdekaan atau lepas dari penjajah saat itu, tetapi juga berkemampuan untuk

memotivasi masyarakat khususnya pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai perwujudan harga diri bangsa dengan mengorbankan tidak hanya harta benda tetapi juga jiwa dan raga. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi pemimpin dalam menggalang kekuatan rakyat pada semua lapisan untuk melakukan segala upaya guna mempertahankan harga diri bangsa di tengah-tengah keberadaannya dengan bangsa-bangsa lain. Atas dasar pemikiran inilah, maka pembahasan ini ditujukan bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk memantapkan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan guna ketahanan nasional dalam rangka membangkitkan jiwa nasionalisme. Karena salah satu persoalan bangsa yang akhir-akhir ini mengemuka, bahkan menjadi semacam “ancaman” adalah fenomena yang mengarah pada terjadinya intoleransi. Pada bagian ini akan dibahas landasan pemikiran berupa peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta serta lingkungan strategis untuk merumuskan pemantapan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan guna ketahanan nasional.

8. **Peraturan Perundang-undangan.**

a. Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pada pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis dalam menentukan hak dan kewajiban warganya. Dalam konteks beragama, pasal ini menjelaskan jaminan dari negara kepada masyarakat untuk beribadat menurut agamanya masing-masing yang sangat beragam. Sehingga dapat diartikan bahwa kebebasan yang diberikan negara kepada masyarakat dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tetap harus menjunjung tinggi demokrasi, toleransi antar umat beragama dan wawasan kebangsaan¹².

b. Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Polri. Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa Polri memiliki kewajiban untuk menjaga

¹² News.detik.com. Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 : Bunyi dan Implementasinya, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5491922/pasal-29-ayat-2-uud-1945--bunyi-dan-implementasinya> pada 24 April 2022.

keamanan ketertiban masyarakat, maka dengan adanya peristiwa-peristiwa intoleransi yang mengarah terhadap disintegrasi bangsa dan mengganggu ketahanan nasional perlu dilakukan penindakan hukum.

c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa Pembukaan UUD tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara. Dari amanat UUD 1945 tersebut, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan nasional harus berwawasan kebangsaan dan antisipatif terhadap perkembangan, termasuk kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa.

d. Undang-Undang RI No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Maka, keberadaan TNI yang telah tersebar di seluruh pelosok tanah air, memiliki peran yang strategis untuk membantu pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan terhadap seluruh komponen bangsa.

e. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil Political Right (CCPR)*. Pada pasal 18 undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap negara berhak atas kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama. Dimana tidak

seorangpun dapat dipaksa untuk mengganggu kebebasan dalam menganut sebuah agama dan kebebasan menjalankan sesuai dengan agama yang dianutnya¹³. Ratifikasi terhadap undang-undang ini memberikan makna bahwa negara memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Namun demikian, tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada seseorang, yang dapat mengganggu sikap toleransi dan wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia.

f. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada pasal 45A menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, menyesatkan, menimbulkan rasa kebencian, permusuhan berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Artinya keberadaan undang-undang ini dapat dijadikan sebagai landasan yuridis bagi aparat untuk melakukan penindakan terhadap kasus-kasus tersebut diatas.

g. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada pasal 21 dijelaskan bahwa Ormas berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, norma kesusilaan, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan Ormas dapat dijadikan sebagai ujung tombak pemerintah untuk memantapkan toleransi dan wawasan kebangsaan terhadap seluruh komponen masyarakat.

9. Kerangka Teoritis.

a. Teori.

- 1) Teori *Pentahelix*. Teori *Pentahelix* berkembang dalam studi ilmu manajemen dan administrasi publik, dimana kemudian

¹³ Ibid, news.detik.com

diaplikasikan dalam berbagai kajian ilmu yang lebih luas lagi, baik dalam ilmu politik, studi lingkungan dan kebijakan publik¹⁴. Lahirnya teori *Pentahelix* dilatarbelakangi oleh model teori-teori sebelum seperti *triple helix* dan *quadro helix*. Teori pentahelix ini sangat bermanfaat untuk berbagai permasalahan yang melibatkan banyak pihak, dimana pemangku kepentingan dapat mewakili berbagai kepentingan di suatu lokasi¹⁵.

Menurut Soemaryani (2016), model *Pentahelix* merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait didalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Rampersad, Quester & Troshani (dalam Halibas, Sibyan dan Maat (2017)), kolaborasi *Pentahelix* memiliki peran penting untuk bermain didalam mendukung tujuan inovasi bersama sesuai dengan peran dan bidangnya masing-masing. Akademisi (guru, dosen, dll), swasta (instansi swasta), pemerintah (termasuk TNI/Polri), media (cetak, audio, video, online), komunitas/ormas (*civil society*). Artinya, peran tersebut sangat strategis untuk membangun sebuah toleransi dan wawasan kebangsaan seluruh komponen bangsa.

2) Teori Koherensi (kebenaran). Dalam sejarahnya, masalah kebenaran (koherensi) telah menyertai setiap kegiatan yang sifatnya ilmiah. Hal ini dikarenakan setiap ilmu pengetahuan, khususnya sebagai suatu proses kegiatan manusia diurukan untuk mencapai suatu kebenaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebenaran (koherensi) merupakan salah satu keadaan yang memberikan petunjuk adanya kesamaan antara pikiran manusia terhadap objek dengan kenyataan yang sebenarnya. Artinya, kebenaran (koherensi) merupakan salah satu proses yang dapat menunjukkan adanya keadaan yang runut, masuk akal antara satu gagasan dan objek

¹⁴ Astuti, Retno Sunu, dkk, 2020. *Collaborative Governance* dalam Perspektif Administrasi Publik, FISIP Undip, Semarang, h. 99

¹⁵ Ibid, hal 103

tertentu¹⁶. Artinya, apabila suatu individu mengatakan bahwa pendapat terhadap objek itu benar, maka ciri-ciri pokoknya dari pendapat tersebut harus runut, gagasan-gagasan yang mendukungnya saling berhubungan dan masuk akal. Seperti Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia berisi tentang kebenaran atas dasar pentingnya hidup toleransi dan wawasan kebangsaan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan. Karena Pancasila berisi rumusan gagasan-gagasan sebagai pedoman dan pegangan hidup, tingkah laku serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seluruh bangsa Indonesia.

3) Teori Persepsi. Dalam cabang ilmu filsafat (epistemologi), persepsi merupakan salah satu isu sentral yang berkaitan dengan dasar atau batasan pengetahuan. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyusun, menafsirkan dan mengenali berbagai informasi sensoris yang dapat memberikan suatu gambaran atau pemahaman tentang suatu lingkungan. Persepsi merupakan suatu proses dimana individu menginterpretasikan dan mengatur kesan-kesan sensoris untuk memberikan arti bagi lingkungan dimana mereka hidup yang berdasarkan pada persepsi mereka tentang suatu kenyataan¹⁷.

Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI yang merupakan 4 (konsensus) nasional yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia merupakan suatu kenyataan dimana seluruh warga bangsa Indonesia menjunjung tinggi toleransi dan wawasan kebangsaannya. 4 (empat) konsensus nasional tersebut mengajarkan bagaimana

¹⁶ Budisutrisna, 2016. Komparasi Teori Kebenaran (Koherensi) Mo Tzu dan Pancasila : Relevansi Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Indonesia. Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

¹⁷ Alizamar, 2016. Psikologi Persepsi & Desain Informasi : Sebuah Kajian Psikologis Persepsi dan prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual. Media Akademi, Jogjakarta, h. 14-15.

warga bangsa Indonesia menjalankan kehidupannya sehari-hari dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan.

4) Teori Pendidikan Karakter. Berdasarkan pendapat dari David Elkind & Freddy Sweet Ph.D (2004), dalam Zubaedi, pendidikan karakter merupakan usaha sengaja (sadar) untuk membantu manusia untuk memahami, peduli dan melaksanakan nilai-nilai estetika atau etika inti¹⁸. Pendidikan karakter juga dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk menanamkan kecerdasan dalam penghayatan bersikap, berpikir maupun pengalaman dalam bentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah menjadi jati diri. Hal ini dapat diwujudkan melalui interaksi dengan Tuhannya, individu atau diri sendiri, antar sesama manusia maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Pendidikan karakter dapat dipahami sebagai sebuah pendidikan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter kepada seluruh peserta didik. Nilai-nilai luhur dimaksud yaitu kemandirian, kejujuran, kemuliaan sosial, sopan santun sampai dengan kecerdasan berfikir logis¹⁹. Konsep pendidikan karakter ini sangat berkaitan erat dengan membangun sikap nasionalisme warga negara Indonesia, sebagai pola pendekatan multikulturalisme.

10. **Data dan Fakta.**

a. **Pemahaman masyarakat bangsa Indonesia terhadap toleransi maupun wawasan kebangsaan.** Pemahaman masyarakat bangsa Indonesia terhadap makna dan implementasi toleransi serta wawasan kebangsaan sangat diwarnai oleh keadaan toleransi dan wawasan kebangsaan dari tokoh-tokoh masyarakat sebelumnya. Dalam perkembangan dan perjalanannya sebagai bangsa yang merdeka, sampai dengan saat ini pemahaman toleransi dan wawasan kebangsaan

¹⁸ Zubaedi, 2011. Desain Pendidikan Karakter : konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 17

¹⁹ Ibid, h. 20

masyarakat pada tataran empirik di lapangan, menunjukkan terjadi berbagai perubahan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak.

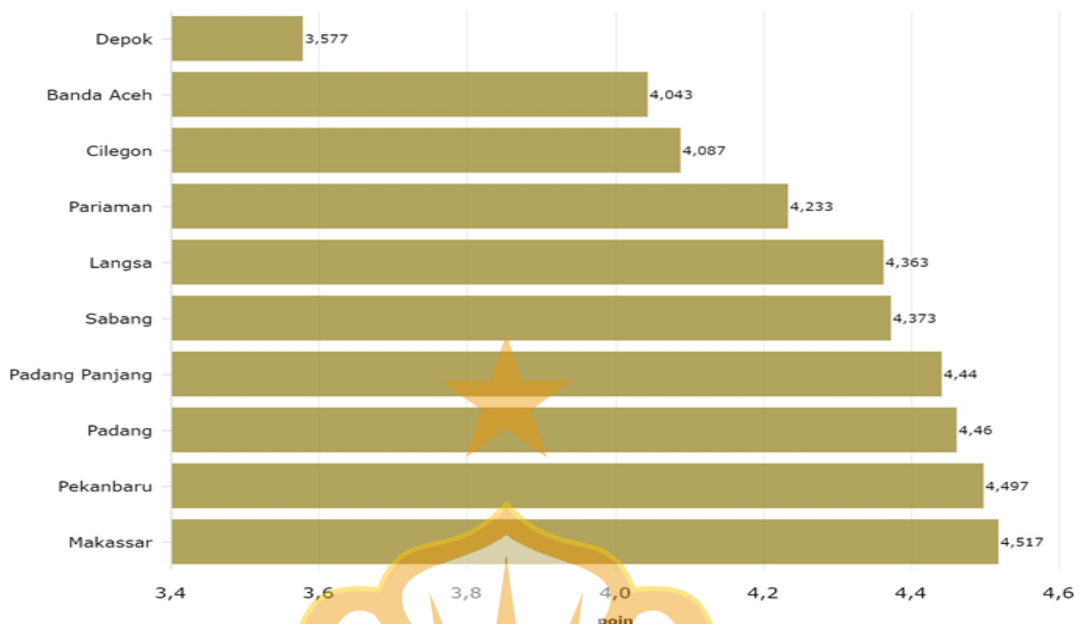
Kondisi toleransi dan wawasan kebangsaan saat ini ditinjau sesuai pengertiannya yakni sebagai pendorong munculnya kecintaan pada bangsa dan negara serta keinginan kuat untuk menjadi perekat kebangsaan dari satu *nation-state* dengan ciri masyarakatnya yang multikulturalisme dan heterogen dinilai sedang mengalami kemerosotan²⁰. **Toleransi** merupakan sikap membiarkan individu atau kelompok lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya masing-masing, sebatas tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Sedangkan **wawasan kebangsaan** merupakan wawasan nusantara yaitu bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Hal tersebut bermakna bahwa toleransi dan wawasan kebangsaan memiliki keterikatan satu sama lain. Sehingga dengan kurang optimalnya pemahaman dan implementasi tentang toleransi dan wawasan kebangsaan menimbulkan berbagai dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai contoh adalah dengan mengutip hasil Riset Setara Institute, pada tahun 2021, dimana kota Depok menjadi kota “intoleran” di Indonesia. Riset ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem skor dengan rentang 1-7, dimana semakin tinggi skornya, kondisi toleran semakin baik. Setara Institute melakukan penelitian di 94 kota di Indonesia dengan menggunakan empat skala variabel dengan delapan indikator untuk mengukur tingkat toleransi, di antaranya: Regulasi Pemerintah Kota: Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, maupun kebijakan diskriminatif. Berikut gambaran grafik hasil riset tentang rasa toleransi tahun 2021²¹ :

²⁰ Republika.com. Indonesia dan Dampak individualisme, diakses melalui <https://retizen.republika.co.id/posts/44406/indonesia-dan-dampak-individualisme> pada 1 April 2022

²¹ Setara Institute, 2021

Gambar 1. Grafik Tingkat Toleransi di Indonesia




Sumber : Riset Setara Institue, 2021 (diolah kembali)

b **Pendekatan multikulturalisme dalam mengatasi permasalahan ketahanan nasional.** Setelah bergulirnya masa reformasi, kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Demokrasi bangsa Indonesia yang Pancasila, secara *contents* bergeser ke arah demokrasi liberal. Dimana demokrasi yang dimaknai dengan kebebasan berpendapat, seakan berjalan kebablasan. Pada muaranya bukan lagi demokrasi Pancasila yang dipraktekkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun demokrasi liberal. Kasus-kasus terbaru yang berkaitan dengan multikulturalisme diantaranya adanya himbauan tidak boleh menggunakan bahasa daerah dalam forum-forum resmi oleh anggota legislatif, adanya pendiskriminasian salah satu daerah dan adanya indikasi pelecehan terhadap keyakinan suatu agama di wilayah bencana, telah menimbulkan gejolak dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan mental dan moral bangsa yang pada waktu beberapa dekade ke belakang terkenal dengan masyarakat yang memiliki sopan santun dan memiliki akhlak mulia, menjadi tergerus oleh perkembangan lingkungan global yang masuk ke dalam lingkungan

kehidupan bangsa Indonesia. Berikut adalah contoh data dan fakta pola pendekatan multikultur yang kurang optimal dilaksanakan oleh beberapa lembaga survei, sehingga menyebabkan terjadinya intoleran di Indonesia.

Tabel 1. Peta Temuan Survei Opini dan Sikap Intoleran di Indonesia

SEGMENT MASYARAKAT	INDIKATOR TOLERAN	WAHID FOUNDATION		ALVARA	LIPI
		2018	2019	2019	2020
Siswa dan Mahasiswa Muslim	Opini			29,5% (Mahasiswa), 29,7% (Siswa SMA) tidak setuju pemimpin non muslim	
	Sikap				
Guru dan Dosen Muslim Profesional	Opini				
	Sikap			29,7 % tidak setuju pemimpin non muslim	
Umat Muslim	Sikap	56% menolak kelompok yg tidak disukai	57% menolak kelompok yang tidak disukai		
Masyarakat Umum	Opini				51 % merasa terancam dengan aliran sesat
	Sikap				50,5% tidak percaya orang yang berbeda agama

Sumber : Peta Kuasa Intoleransi dan radikalisme di Indonesia, 2021 (diolah kembali)

Dari survei yang telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga survei diatas ditemukan beberapa faktor beragam yang mempengaruhi opini, sikap dan aksi intoleransi yang berdasarkan kepada kelompok survei. Dimana faktor yang dominan adalah terkait oleh pengetahuan dan

perasaan. Timbulnya faktor-faktor tersebut diindikasikan kurangnya atau terbatasnya pola pendekatan multikultur yang ada di masyarakat²². Hal tersebut dapat dibuktikan melalui gambaran dalam tabel berikut sebagai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya intoleransi.

Tabel 2. Faktor-faktor intoleransi

LEMBAGA SURVEI	SEGMENT YG DISURVEI	FAKTOR-FAKTOR INTOLERANSI
PPIM UIN Jakarta	Siswa dan Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Guru/Model pembelajaran PAI - Akses internet sebagai sumber pengetahuan agama - Tokoh/ustadz/ustadzah yang menjadi panutan
	Guru Muslim	<ul style="list-style-type: none"> - Pandangan islamis - Demografi (gender, usia, tingkat penghasilan, dll) - Ormas dan sumber pengetahuan agama
Wahid Foundation	Umat Muslim	<ul style="list-style-type: none"> - Perasaan teralienasi/terdeprivasi dan terancam - Pemahaman literal teks agama - Frekuensi mengikuti berita keagamaan - Intoleransi umum
Alvara	Profesional, mahasiswa dan siswa SMA	<ul style="list-style-type: none"> - Politik identitas
LIPI	Masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> - Perasaan terancam oleh agama lain - Ketidakpercayaan terhadap agama lain - Ketidakpercayaan terhadap suku lain - Fanatisme agama - Sekularisme - Penggunaan media sosial

Sumber : Peta Kuasa Intoleransi dan radikalisme di Indonesia, 2021 (diolah kembali)

Dari adanya kejadian-kejadian yang telah diuraikan diatas serta dihadapkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, maka perlunya dipertanyakan pola pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, baik melalui kebijakan maupun melalui

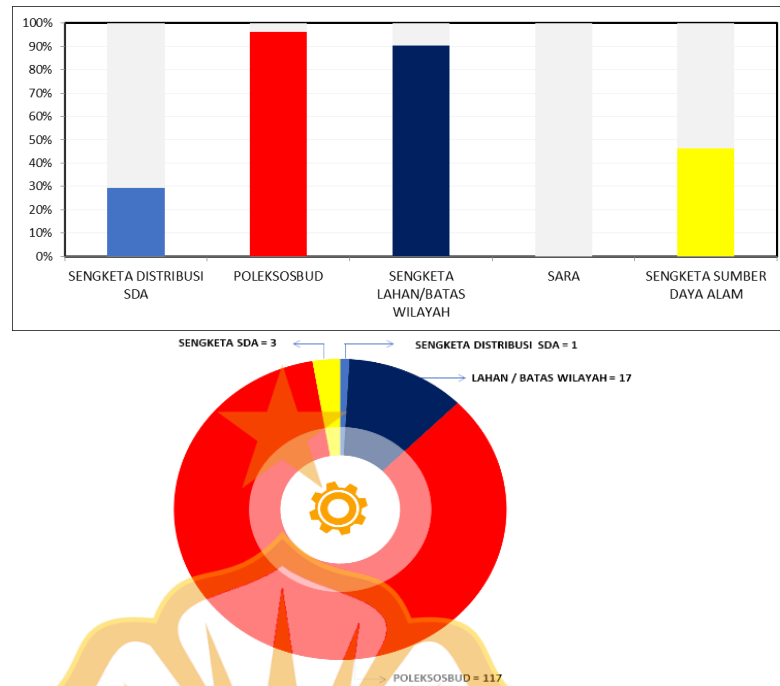
²² Azhari, Subhi. 2021. Peta Kuasa Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia (Laporan Studi Literatur)

penanganan secara langsung oleh aparat negara, seperti kepolisian, kejaksaan dan TNI. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang mendapatkan legitimasi untuk mengatur negara, telah diberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengambil sebuah kebijakan yang dapat mewujudkan pemantapan toleransi. Artinya, bagaimana pemerintah melakukan pengawasan, koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara. Kondisi bangsa yang multikulturalisme atau kebhinekaan memerlukan suatu pengelolaan yang baik, sehingga tidak menjadi ancaman bagi keutuhan dan kesatuan bangsa. Bahkan ironisnya, pada tatanan kehidupan bernegara banyak dijumpai partai politik yang hanya memberikan janji-janji palsu dan mengatasnamakan kepentingan rakyat, namun implementasinya pasca Pemilihan Umum belum juga terealisasi. Semangat Kebangsaan yang ada saat ini tidak ditransformasikan kepada bagian lain secara terpolo sebagai perekat kesatuan, menyebabkan menurunnya tingkat semangat kebangsaan dan dikhawatirkan akan menjadi ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa.

c. **Peran dari komponen bangsa dalam implementasi toleransi dan wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat.** Keberagaman suku, ras, agama, bahasa dan lain-lain didukung oleh wilayah-wilayah yang berbentuk kepulauan, tidak dipungkiri sebagai kondisi rawan bagi terjadinya disintegrasi. Sebuah integrasi akan terbentuk tatkala adanya kesamaan. Realitasnya Indonesia dapat menegara, hal ini menunjukkan adanya kesamaan dalam keberagaman. Ditinjau dari aspek pertahanan makna kesatuan mengandung pengertian bahwa ancaman dari salah satu aspek kehidupan nasional atau sebagian wilayah negara secara langsung atau tidak langsung, juga merupakan ancaman pada aspek-aspek yang lain. Sebab ketidakstabilan pada suatu aspek, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap stabilitas dari aspek lain. Sementara dinamika kebangsaan selalu diliputi oleh berbagai kepentingan yang memerlukan usaha agar berbagai kepentingan itu senantiasa berada dalam rel kebangsaan menuju cita-cita nasional.

Namun demikian, keberagaman bangsa Indonesia telah menimbulkan berbagai persoalan seperti yang sekarang dihadapi bangsa ini. Salah satu contohnya oknum lembaga Legislatif dan oknum anggota Parpol, perannya kurang memberikan contoh tauladan terhadap masyarakat bangsa Indonesia, dimana dalam setiap pernyataan dan kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan berbagai polemik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bukan saja masalah korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara (tingkat pusat dan daerah), namun juga terjadi perseteruan politik. Sebagai contoh adalah adanya pernyataan yang inkonstitusional dari oknum pejabat negara terkait dengan pembatalan Pemilu 2024. Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai penafsiran negatif di kalangan masyarakat secara luas, bahkan memicu konflik.

Demikian juga di dalam tubuh instansi pemerintah seperti TNI dan Polri, perannya masih kurang memberikan kontribusi positif terhadap implementasi toleransi dan wawasan kebangsaan. Hal ini dikarenakan beberapa personel TNI maupun Polri kurang optimal mengabdikan dirinya bagi negara. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika dalam pelaksanaan tugasnya kurang peduli terhadap kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Banyak oknum prajurit TNI dan Polri yang melanggar sumpahnya sebagai aparat negara dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga banyak anggapan dari masyarakat bahwa kedua institusi ini hanya memihak kepada pemerintah sebagai penguasa, daripada membela masyarakat. Sebagai contoh banyak terjadinya konflik antara masyarakat dengan aparat akibat pembebasan lahan milik masyarakat yang dirasa tidak ada keadilan. Pada tahun 2021, kasus tersebut menempati urutan kedua setelah konflik Poleksosbud. Berikut data perbandingan sumber konflik di tahun 2021.

Grafik 2. Perbandingan sumber konflik tahun 2021²³

Sumber : Kemendagri, 2021 (diolah kembali)

11. **Lingkungan Strategis.** Pengaruh perkembangan lingkungan strategis bukan merupakan fenomena baru dalam perjalanan bangsa-bangsa di dunia. Globalisasi dan perkembangan yang terjadi di lingkungan global, regional maupun nasional merupakan suatu proses yang bergerak dengan intensitasnya semakin lama semakin tinggi dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses perkembangan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan termasuk masalah Pertahanan dan keamanan negara. Disatu sisi berdampak positif, di sisi lain perkembangan tersebut berdampak negatif misalnya disintegrasi, anarki, unilateralisme, eksklusifisme dan isolasi.²⁴ Perkembangan ini telah membawa nuansa baru dalam dinamisasi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan Pertahanan keamanan baik dalam lingkup global, regional maupun nasional. Oleh karenanya pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan perlu terus ditingkatkan.

²³ Taruna, Handoko (PLT. Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri), 2022. Peta Konflik Sosial di daerah, Disampaikan pada pelatihan peningkatan kepemimpinan perempuan perdamaian pada tanggal 28 Maret 2022.

²⁴ Faisal H. Basri, 2005. Krisis Ekonomi di tengah gelombang globalisasi Implikasinya bagi kerjasama Ekonomi di Asia Pasifik, Jakarta, Gramedia, h 3.

a. **Perkembangan Lingkungan Global.**

1) Globalisasi teknologi. Perkembangan teknologi telah menjadikan kehidupan dunia bergerak tanpa batas, sehingga menuntut seluruh masyarakat, khususnya generasi milenial untuk mahir menggunakan teknologi. Generasi milenial adalah generasi yang lahir di saat modernisasi teknologi diperkenalkan, sehingga menjadikan generasi milenial menjadi generasi yang spesial dari generasi sebelumnya. Di Indonesia, generasi milenial menempati 32 % atau sekitar 81 juta penduduk dari total jumlah penduduk Indonesia. Berkembangnya teknologi menyebabkan kehidupan generasi milenial menjadi tidak akrab satu sama yang lain, karena dengan teknologi merasa dirinya tidak membutuhkan kehadiran orang lain. Sikap individualistis sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat milenial, bahkan paham intoleran dan radikalisme dapat mengkontaminasi perkembangan paham ideologi yang dianutnya. Hal ini disebabkan dengan sifat kaum milenial yang ingin tahu dan dengan mudahnya mengakses berbagai informasi melalui media sosial, sehingga mereka memilih konten yang berbau intoleran dan radikal yang lebih menarik dan membius pemahaman mereka yang dapat dikatakan masih polos. Artinya, berkembangnya sikap intoleran di kalangan milenial diakibatkan oleh minimnya informasi yang diserap dan akhirnya menyerap informasi yang salah, sehingga menimbulkan sikap antipati (sikap toleransi masyarakat menjadi rendah)²⁵. Oleh karena itu pematapan toleransi dan wawasan kebangsaan terhadap generasi milenial perlu ditingkatkan, sehingga perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyatukan kehidupan bangsa Indonesia yang multikulturalisme.

2) Demokratisasi. Gencarnya gelombang demokratisasi, keterbukaan, hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, perdagangan bebas dan senjata pemusnah massal, telah mendorong timbulnya pandangan kontroversial kontemporer

²⁵ Kementerian Agama RI, Toleransi di Kalangan generasi Milenial, Artikel populer Januari 2021.

yang cenderung bersifat eksklusif. Hal ini mendorong tumbuh dan berkembangnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / *Non Governmental Organization* (NGO) yang dapat menembus otoritas yang telah ada dan mampu menerobos batas-batas fisik antar negara. Sebagian organisasi tersebut tampil sebagai partisan badan-badan resmi, meskipun ada juga NGO yang bersifat "*pressure group*" (kelompok penekan) dan mempengaruhi proses penentuan kebijakan badan-badan resmi (pemerintah). Saat ini, Indonesia masih berada di tingkat ke-52 negara paling demokrasi berdasarkan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dan masuk dalam kategori *flower democracy* (demokrasi cacat)²⁶. Kondisi ini akan memicu timbulnya berbagai propaganda untuk menurunkan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan masyarakat. Sehingga diperlukan pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan guna mencegah disintegrasi bangsa.

b. **Perkembangan Lingkungan Regional.**

1) **Stabilitas regional Asia Tenggara.** Secara umum stabilitas regional Asia Tenggara relatif dinamis terkendali, sehingga negara-negara di kawasan ini mampu meningkatkan pembangunan ekonominya masing-masing. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam memelihara stabilitas regional melalui kerangka kerjasama Hancam di Asia Tenggara dalam bentuk pengaturan bersama keamanan regional (*Regional Security Arrangement*) yang dituangkan ke dalam berbagai Forum antara lain ZOPFAN, *Declaration of Asean Concord (DAC)*, *Treaty of Amity Cooperation in South East Asia (TAC)* dan *Asean Regional Forum (ARF)* maupun patroli terkoordinasi di selat Malaka (EIS). Oleh karena itu untuk menjaga stabilitas perkembangan lingkungan regional diperlukan persiapan yang baik, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM sebagai

²⁶ Cnbcindonesia, Indeks Demokrasi RI Melesat ke Peringkat 52 Dunia, diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2022/01/31/320/2540729/10-negara-dengan-ekonomi-terbesar-dunia-indonesia-nomor-berapa?page=2> pada 17 April 2022

subyek dan obyek dari pembangunan nasional, sehingga semangat toleransi, wawasan kebangsaan dan kerelaan berkorban anak bangsa ini tetap terpatri dalam dirinya.

2) Ancaman Disintegrasi. Pada era global sekarang ini, banyak negara yang mengalami ancaman disintegrasi, dengan mengemukanya masalah ketidakadilan, kesukubangsaan, kedaerahan dan sentralistik kekuasaan. Contohnya peristiwa di Myanmar mulai dari ketidaksewenangan terhadap suku Rohingya dan terjadinya perebutan kekuasaan²⁷, serta peristiwa kekerasan terhadap etnis Uighur di China²⁸. Tidak menutup kemungkinan, peristiwa tersebut dapat terjadi di Indonesia dengan tingkat heterogenitasnya yang sangat tinggi. Sehingga diperlukan pemantantapan toleransi dan wawasan kebangsaan seluruh komponen bangsa.

c. **Perkembangan Lingkungan Nasional.**

1) Aspek Geografi. Secara geografi, bangsa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil dalam wilayah nusantara, yang terbentang dari Sabang sampai merauke dan disatukan oleh adanya kesadaran, semangat dan tekad kebangsaan, satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air yaitu Indonesia yang dilandaskan oleh Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara. Namun harus disadari saat ini nilai Pancasila cenderung telah terpinggirkan dan menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang dapat mengancam integrasi bangsa seperti timbulnya kekerasan, luntarnya semangat gotong royong dan berkurangnya kerukunan masyarakat dalam berbagai aspek

²⁷ Kompas.com. 100 Hari Kudeta Myamar : Rangkuma Peristiwa dan Perkembangan terkini, diakses melalui <https://www.kompas.com/global/read/2021/05/10/121633970/100-hari-kudeta-myanmar-rangkuman-peristiwa-dan-perkembangan-terkini?page=all> pada 1 April 2022

²⁸ Tempo.com. Sejarah Kekerasan Terhadap Etnis Uighur di Xinjiang, diakses melalui <https://dunia.tempo.co/read/1287193/sejarah-kekerasan-terhadap-etnis-uighur-di-xinjiang> pada 1 April 2022

(intoleran)²⁹. Oleh karenanya perlu pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan agar kemajemukan masyarakat Indonesia dapat menyatukan kembali wilayah Nusantara dalam satu koridor persatuan dan kesatuan.

2) Aspek Demografi. Penduduk Indonesia yang berjumlah 273.879.750 jiwa³⁰, merupakan potensi yang sangat besar dalam upaya membangun bangsa guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Seperti yang telah diuraikan diatas, dari jumlah penduduk yang sangat besar, 32 % dari komposisi penduduk merupakan kaum milenial yang rentan akan adanya berbagai provokasi yang menjurus ke ranah intoleran dan paham radikal. Dihadapkan dengan perkembangan teknologi informasi, maka kondisi tersebut akan terus berkembang menjadikan sebuah ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan. Sehingga perlu adanya pemantapan intoleransi dan wawasan kebangsaan, agar masyarakat bangsa Indonesia menjadi pilar terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.

3) Aspek Sumber Daya Alam. Potensi kekayaan alam Indonesia merupakan modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Dengan adanya skenario liberalisasi guna menguasai sumber daya alam Indonesia, mengakibatkan terpinggirkannya hak ulayat masyarakat sebagai pemilik sah sumber daya alam yang ada. Dengan kehidupan masyarakat yang multikultural menyebabkan adanya suatu perpecahan antara kelompok yang pro terhadap konsep

²⁹ Kemenko Polhukam RI, 2016. Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa, h. 66

³⁰ Kemendagri. 273 juta penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri, diakses melalui [https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri#:~:text=Jakarta%20-%20Kemendagri%20melalui%20Direktorat%20Jenderal,Indonesia%20adalah%20273.879.750%20jiwa](https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri#:~:text=Jakarta%20-%20Kemendagri%20melalui%20Direktorat%20Jenderal,Indonesia%20adalah%20273.879.750%20jiwa.). Pada 1 April 2022

liberalisasi dan yang kontra³¹. Hal ini memicu terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

4) Aspek Ideologi. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih tetap dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada tataran implementasi, masih belum sepenuhnya dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, sehingga masih ada kelompok tertentu yang menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai media dalam proses perjuangan kelompoknya. Sementara itu sosialisasi Pancasila oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) diindikasikan belum mampu menjangkau ke seluruh pelosok tanah air, dan hanya sebatas memanfaatkan media teknologi dan informasi yang berkembang. Oleh karena itu dalam dinamika kehidupan bangsa senantiasa perlu diwaspadai kemungkinan bergesernya nilai-nilai kejuangan bangsa, seperti munculnya sikap intoleran dan lunturnya Wawasan Kebangsaan, rasa cinta tanah air, kesadaran bela negara, kesadaran mendahulukan kepentingan umum dan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga diperlukan adanya pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan guna mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

5) Aspek Politik. Hubungan lembaga-lembaga politik baik dalam tataran supra struktur, infra struktur dan sub struktur dalam mekanisme politik meskipun sudah mulai menampakkan kemapanannya, namun belum secara sinergis dapat membangun kehidupan politik yang stabil. Elite kekuasaan dan elit partai cenderung mengutamakan dan berorientasi kepada kepentingan partai serta mempertahankan kedudukan dari pada kepentingan

³¹ Kesabngpol.bantenprov, 2019. Wawasan Kebangsaan 94 Konsensus Dasar Berbangsa dan bernegara), diakses melalui <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-ideologi-dan-wawas.html> pada 24 April 2022

bangsa dan negara. Masih adanya ungkapan dari beberapa penyelenggara terkait dengan dinamika politik Indonesia, akan mempengaruhi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya akan memicu munculnya sebuah konflik di masyarakat. Sehingga pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan juga perlu ditingkatkan di kalangan penyelenggara negara.

6) Aspek Ekonomi. Kondisi makro ekonomi negara secara umum terlihat membaik dengan memperhatikan beberapa indikator ekonomi nasional dalam kurun waktu belakangan ini. Namun akibat terjadinya pandemi Covid 19 sejak awal tahun 2020 lalu, belum optimalnya kemampuan pemerintah dan sektor swasta untuk mewujudkan lapangan kerja yang cukup, menimbulkan pengangguran menjadikan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin parah. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi menyebabkan terjadinya intoleran dalam kehidupan masyarakat. Menurut beberapa penelitian, dimana kelompok yang sosial ekonominya rendah memiliki kecenderungan untuk bersikap intoleran. Sebaliknya, masyarakat dengan berpenghasilan tinggi, maka sikap toleransi yang tinggi pula³². Sehingga pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan perlu terus ditingkatkan dalam rangka menjaga integrasi bangsa.

7) Aspek Sosial Budaya. Kemerosotan sendi-sendi kehidupan sosial budaya yang berkaitan dengan moral dan etika yang merusak kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan tingkat kehidupan sosial, tingkat pendidikan dan kesehatan yang masih rendah ikut mempengaruhi kesiapan bangsa Indonesia memasuki era global. Kesenjangan sosial yang terus melebar di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan inilah salah satu penyebab yang

³² Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSK), Kemendikbud RI, 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Toleransi di Indonesia, h. 8

membangkitkan kecemburuan sosial dan merangsang kearah kekerasan sosial. Pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial yang diakibatkan oleh kemajemukan masyarakat, primordialisme sempit, kesenjangan sosial dan pengaruh negatif budaya asing.

8) Aspek Hankam. Kondisi keamanan dalam negeri saat ini masih cukup memprihatinkan seperti aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat dan mahasiswa setiap saat dapat terjadi dimana saja serta penyebaran paham radikalisme yang telah menyasar generasi muda di lingkungan perguruan tinggi/kampus. Rakyat sangat rentan dari provokasi pihak tertentu untuk memecah belah bangsa, akar permasalahannya mencakup ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Kebhinekaan bangsa belum mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah, akibatnya konflik dan pertentangan antar kelompok dan golongan tidak dapat diredam dengan baik. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi kecenderungan merosotnya rasa toleransi dan wawasan kebangsaan masyarakat. Dengan demikian, pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan menjadikan hal yang serius dilaksanakan oleh pemerintah.



BAB III

PEMBAHASAN

12. **Umum.** Bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan modern, yang pada hakekatnya adalah negara dimana dalam pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongannya. Oleh karena itu, semangat toleransi dan wawasan kebangsaan menjadi salah satu syarat mutlak untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan tidak ada lain untuk menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang pada muaranya akan mewujudkan ketahanan nasional di segala bidang. Sebenarnya rasa kebangsaan atau nasionalisme bangsa Indonesia belum memudar, sekalipun saat ini didera oleh berbagai isu intoleransi dan degradasinya wawasan kebangsaan akibat pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, komunikasi, liberalisasi serta proses demokrasi yang keblasan. Sampai saat ini masih ada sejumlah tantangan dalam mengelola keberagaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika, salah satunya adalah konflik intoleransi. Konflik intoleransi sendiri didefinisikan oleh Rusdi (2021) sebagai konflik yang muncul akibat gangguan dari satu atau kelompok orang terhadap orang lain atau kelompok lain terkait dengan identitas sosial³³. Konflik ini muncul sebagai akibat kurangnya tenggang rasa dan saling menghormati sesama masyarakat dan kurangnya kesadaran akan kehidupan bersama dalam landasan multikulturalisme³⁴. Belakangan, konflik intoleransi juga marak terjadi akibat politik identitas, khususnya terkait dengan upaya

³³ Rusdi, Muhamad, 2021. Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta.

³⁴ Wahidfoundation.org. Yani Wahid : Intoleransi dan radikalisme Masih Jadi PR Pemerintah Mendatang, diakses melalui <https://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Yenny-Wahid-Intoleransi-dan-Radikalisme-Masih-Jadi-PR-Pemerintahan-Mendatang> pada 10 Juni 2022

mempolitisasi agama sebagai alat untuk menarik dukungan politik oleh oknum tertentu³⁵.

Oleh karena itu, untuk ketahanan nasional yang tangguh ditinjau dari berbagai aspek, dibutuhkan sistem penguatan toleransi dan wawasan kebangsaan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dimana setiap individu harus memiliki kesadaran bela negara. Sistem penguatan toleransi dan wawasan kebangsaan yang dibahas dalam penulisan taskap ini mencakup pemantapan pemahaman masyarakat bangsa Indonesia terhadap makna dan implementasi toleransi maupun wawasan kebangsaan; pola pendekatan multikulturalisme dalam mengatasi permasalahan ketahanan nasional; dan memantapkan peran dari komponen bangsa dalam implementasi toleransi dan wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat didukung komponen bangsa lainnya.

13. Analisis pemantapan pemahaman masyarakat bangsa Indonesia terhadap toleransi maupun wawasan kebangsaan. Mencermati data dan fakta pada bab terdahulu, masih adanya sikap intoleransi yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat menandakan bahwa wawasan kebangsaan masyarakat telah terdegradasi, atau dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat akan kehidupan multikulturalisme bangsa Indonesia yang merupakan anugerah dari Tuhan YME, tidak dapat dipahami dengan baik. Perkembangan global, regional yang mempengaruhi terhadap perkembangan nasional Indonesia diprediksi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi lunturnya semangat toleransi dan wawasan kebangsaan. Terjadinya konflik antar suku dan ras seperti yang terjadi di Surabaya pada tahun 2019 lalu antara masyarakat dengan mahasiswa Papua, terjadinya tindakan pelanggaran kebebasan beragama oleh pemeluk agama tertentu, penolakan pembangunan tempat ibadah, penodaan agama, penodaan budaya, merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa pemahaman masyarakat akan implementasi toleransi dan wawasan kebangsaan sudah memudar.

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi turut mendorong potensi intoleransi, berikut konflik yang mungkin terjadi. Mudahnya masyarakat

³⁵ Fachrudin, Achmad, 2021. Konflik Politik Identitas : Pergumulan Politik, Agama dan Media Dari Pilkada DKI 2017 hingga Pilpres 2019. Jakarta : Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo).

untuk mengakses berbagai ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia, ternyata tidak diikuti dengan pemahaman dasar akan Pancasila dan Kebhinekaan, sehingga menyebabkan masyarakat cenderung mudah terpapar konten dan narasi intoleransi. Kondisi ini juga diikuti dengan banyaknya kasus intoleransi di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2018 sendiri telah menemukan ribuan konten dan akun intoleran di media sosial. Diantara bentuknya adalah ujaran kebencian (*hate speech*), hoax dan berita dengan nada persekusi terhadap kalangan identitas minoritas. Tercatat, terdapat 3.640 ujaran kebencian berbasis SARA dan Kominfo juga telah memblokir 6.000 situs dan akun media sosial penyebar hoax sejak tahun 2018³⁶.

Faktor terakhir yang kerap menstimulus kasus intoleransi di Indonesia adalah politik identitas yang muncul sebagai bagian dari konstruksi identitas kolektif masyarakat. Politik identitas menjadi salah satu penyebab menguatnya potensi konflik intoleransi menjelang pemilihan umum, seiring dengan mudahnya pemanfaatan pemahaman tekstual masyarakat terkait identitas untuk menarik suara. Dua kasus utama intoleransi menjelang Pemilu yakni ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilu 2019. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, minoritas non muslim di DKI Jakarta menjadi sasaran politik identitas seiring dengan kasus yang menimpa calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Aksi terkait politik identitas seperti Aksi Bela Islam memperkuat narasi intoleransi yang kala itu bergaung, yakni ketidaksetujuan masyarakat DKI Jakarta apabila wilayahnya dipimpin oleh gubernur non-muslim³⁷. Sementara terkait dengan Pemilu 2019, politik identitas menyasar kedua calon presiden yang dibenturkan dengan paradigma "Islam Moderat" dan "Islam Konservatif", dimana masyarakat yang mendukung kedua capres akhirnya juga terpolarisasi dan terkena dampak intoleransi tersebut³⁸.

³⁶ Kominfo.go.id. Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media pada 10 Juni 2022

³⁷ Fernandes, Arya, 2018. Politik Identitas dalam Pemilu 2019 : Proyeksi dan Efektivitas. Jakarta : *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, diakses melalui <https://www.csis.or.id/publications/politik-identitas-dalam-pemilu-2019-proyeksi-dan-efektivitas/> pada 10 Juni 2022

³⁸ Ardipandanto, Aryojati, 2020. Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019 : Perspektif Populisme. Jurnal Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat bangsa Indonesia tidak dapat memahami dengan benar bahwa multikulturalisme bangsa Indonesia merupakan suatu kebenaran (koherensi). Masyarakat bangsa Indonesia tidak memahami bahwa nilai toleransi dalam negara kesatuan tidak terlepas dari bagaimana masyarakat memahami wawasan kebangsaan sebagai suatu koherensi dalam memahami diri dan lingkungannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana dalam teorinya, kebenaran (koherensi) telah menyertai setiap kegiatan yang sifatnya ilmiah. Hal ini dikarenakan setiap ilmu pengetahuan, khususnya sebagai suatu proses kegiatan manusia ditujukan untuk mencapai suatu kebenaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebenaran (koherensi) merupakan salah satu keadaan yang memberikan petunjuk adanya kesamaan antara pikiran manusia terhadap objek dengan kenyataan yang sebenarnya. Artinya, kebenaran (koherensi) merupakan salah satu proses yang dapat menunjukkan adanya keadaan yang runtut, masuk akal antara satu gagasan dan objek tertentu³⁹. Artinya, apabila suatu individu mengatakan bahwa pendapat terhadap objek itu benar, maka ciri-ciri pokoknya dari pendapat tersebut harus runtut, gagasan-gagasan yang mendukungnya saling berhubungan dan masuk akal. Seperti Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia berisi tentang kebenaran atas dasar pentingnya hidup toleransi dan wawasan kebangsaan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila berisi rumusan gagasan-gagasan sebagai pedoman dan pegangan hidup, tingkah laku serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seluruh bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemahaman masyarakat akan implementasi tentang toleransi dan kebangsaan harus mengacu kepada tiga hal yang mendasar yaitu : **Kesadaran** terdiri dari dua realita yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu “kesadaran akan ruang”, dengan arti bahwa secara geografi Indonesia merupakan negara kepulauan serta “kesadaran akan isi” yaitu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dalam etnik, kultur, bahasa dan

³⁹ Budisutrisna, 2016. Komparasi Teori Kebenaran (Koherensi) Mo Tzu dan Pancasila : Relevansi Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Indonesia. Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

agama. **Tekad** merupakan pemahaman masyarakat tentang persatuan dan kesatuan bangsa yang pernah diikrarkan oleh para pemuda pada 28 Oktober 1982. Sumpah Pemuda dapat dijadikan sebagai dasar bagi masyarakat untuk bersatu padu dalam bingkai kebangsaan Indonesia walaupun memiliki perbedaan diantara masyarakat bangsa Indonesia. Sedangkan **semangat** merupakan spirit dari para pendiri bangsa Indonesia dan kita sebagai masyarakat untuk terus menumbuhkan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan di tengah fenomena realita yang terjadi⁴⁰. Melalui tiga kata kunci ini, diharapkan masyarakat bangsa Indonesia dapat memahami realita bangsa Indonesia yang multikultur sebagai suatu koherensi (kebenaran), sehingga ketahanan nasional akan semakin kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai fenomena ancaman. Dalam konteks kemajemukan bangsa Indonesia sebagai sebuah kebenaran adalah konflik antar etnis, konflik agama, konflik budaya dan lain-lain. Konflik dapat muncul karena adanya kemungkinan-kemungkinan yaitu situasi-situasi yang tidak sesuai dalam mencapai tujuan, sasaran, dan alokasi yang tidak sesuai dengan tujuan, munculnya ketidakpastian dalam status pekerjaan dan perbedaan persepsi.

Persepsi merupakan salah satu isu sentral yang berkaitan dengan dasar atau batasan pengetahuan. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyusun, menafsirkan dan mengenali berbagai informasi sensoris yang dapat memberikan suatu gambaran atau pemahaman tentang suatu lingkungan. Persepsi merupakan suatu proses dimana individu menginterpretasikan dan mengatur kesan-kesan sensoris untuk memberikan arti bagi lingkungan dimana mereka hidup yang berdasarkan pada persepsi mereka tentang suatu kenyataan⁴¹.

Sehingga tidak ada cara lain bahwa pemahaman masyarakat dalam implementasi toleransi dan wawasan kebangsaan harus terus dibina dan dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui :

⁴⁰ Menkopolhukam RI, 2016. Wawasan Kebangsaan Dalam Bentuk tanya Jawab, Jakarta, h. 3

⁴¹ Alizamar, 2016. Psikologi Persepsi & Desain Informasi : Sebuah Kajian Psikologis Persepsi dan prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual. Media Akademi, Jogjakarta, h. 14-15.

- a. Pembudayaan dan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, melalui :
- 1) Mewujudkan adanya kebijakan dan strategi nasional baik secara kelembagaan maupun operasional dalam upaya pembudayaan dan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka pembangunan manusia Pancasila, negara Pancasila dan masyarakat Pancasila, di samping usaha pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila, perlu juga dilakukan usaha pelembagaannya dengan menuangkannya dalam perundang-undangan. Dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah dan mendapat persetujuan DPR, merupakan payung hukum guna memperkuat dalam pelaksanaan kegiatan operasional dalam upaya pembudayaan dan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah agar Pancasila dapat diamankan dalam perilaku sehari-hari, dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila perlu diturunkan norma-norma sebagai pedoman.
 - 2) Pengembangan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara secara nasional yang bersifat fungsional perlu ditingkatkan. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila meliputi pengamalan Pancasila dalam seluruh segi kehidupan bangsa dan negara. Sejak semula kita memandang pembangunan nasional kita dalam arti yang seluas-luasnya. Kita memandang pembangunan itu sebagai pembangunan lahir batin, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini mengandung arti bahwa pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, meliputi pengamalan Pancasila dalam seluruh segi kehidupan bangsa dan negara kita baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan dan seterusnya. Tanpa itu, maka Pancasila tetap akan tinggal sebagai semboyan kosong. Penghayatan Pancasila dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk pelaksanaan

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila diperlukan perencanaan yang baik, sehingga mendapatkan hasil yang optimal yang dapat diterima oleh masyarakat dan mampu dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan.

3) Membumikan kembali lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang otonom dan langsung dibawah Presiden RI dengan tugas pokoknya ialah melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan pembudayaan dan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila di lingkungan lembaga-lembaga pemerintah dan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat dibentuk di pusat dan di daerah-daerah sampai daerah tingkat II. Prioritas utama penyuluhan pembudayaan dan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila diberikan kepada pegawai negeri sipil atau militer karena mereka adalah aparatur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan negara dan panutan formal dalam masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat kita yang masih paternalistik keteladanan para pemimpin sangat penting dalam proses pemasyarakatan dan pemberdayaan Pancasila.

b. Meningkatkan pengembangan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara secara nasional yang bersifat fungsional perlu ditingkatkan, melalui :

1) Pengembangan pendidikan nasional dan pembangunan manusia Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemenristekdikti adalah pelaku utama pembangunan ideologi Pancasila, oleh sebab itu harus memainkan peran penting dalam pembangunan manusia Pancasila. Pancasila, diharapkan dapat menjadi mata pelajaran terpisah (tersendiri) dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai strata pendidikan tinggi. Sehingga para peserta didik sebagai generasi penerus bangsa

memiliki pola sikap, pola tindak dan pola pikir berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2) Membentuk kepribadian bangsa sehingga terwujud manusia Indonesia yang berpotensi, berkualitas, bermental dan bermoral serta unggul di bidang intelektual yang berdasarkan Pancasila. Tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Untuk itu kurikulum pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pasar dalam mempermudah mencari pekerjaan serta mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia negara lain.

3) Melaksanakan evaluasi hasil pendidikan, di mulai dari SD, SLTP dan SMU hingga perguruan tinggi. Dalam rangka meningkatkan intelektual sumber daya manusia Indonesia perlu adanya peninjauan kembali kurikulum, materi-materi pelajaran atau kuliah, alat instruksi dan peraga, Laboratorium serta melaksanakan pembekalan kepada guru atau tenaga pengajar terhadap mata pelajaran tertentu. Harapan yang ingin dicapai adalah sumber daya manusia Indonesia memiliki intelektual atau profesionalisme di bidangnya sehingga dapat menghadapi persaingan internasional dalam era globalisasi.

14. Analisis pemantapan pendekatan multikulturalisme dalam mengatasi permasalahan ketahanan nasional. Pengertian multikulturalisme secara etimologis dapat dibedakan dari kata “multi” artinya banyak dan “kultur” mengandung makna “deket” serta “isme” yaitu sebuah paham atau pandangan budaya multikultur yang sebagai lawannya adalah monokulturalisme yang berarti budaya tunggal. Pendekatan multikulturalisme merupakan salah satu strategi pendekatan dengan mengapresiasi berbagai keragaman budaya merupakan salah satu realitas dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan

multikulturalisme ditengarai dapat mengatasi masalah-masalah dalam ketahanan nasional yang dapat merespon dampak yang ditimbulkan oleh berbagai pengaruh seperti perkembangan lingkungan strategis, fenomena konflik antar etnis, konflik sosial budaya yang seringkali muncul dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang memang merupakan masyarakat yang multikultur. Sebagai bagian dari masalah ketahanan nasional, konflik dapat muncul yang disebabkan oleh memanasnya suhu politik, sosio budaya dan agama⁴².

Bangsa Indonesia dilahirkan sebagai bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku, agama, ras, golongan, adat istiadat dan paham. Oleh karena itu cukup beralasan apabila menggunakan sesanti “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu yaitu satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan kebhinekaannya telah menempatkan Pancasila disamping sebagai dasar negara juga dijadikan acuan sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan kepada Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dapat menjadi tuntunan hidup dan sekaligus tujuan hidup bangsa. Oleh karena itu dapat pula menjadi sumber tertib sosial dari seluruh kehidupan baik sebagai individu, ikatan golongan/kelompok, maupun organisasi, serta harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pemantapan nilai-nilai Pancasila dalam rangka memantapkan toleransi dan wawasan kebangsaan perlu ada realitas konkrit diseluruh lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan multikulturalisme bangsa, Pancasila beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat menjadi landasan atau pondasi peningkatan pendidikan karakter bagi seluruh warga negara Indonesia agar saling menghormati terhadap kearifan lokal.

Berdasarkan pendapat dari David Elkind & Freddy Sweet Ph.D (2004), dalam Zubaedi, pendidikan karakter merupakan usaha sengaja (sadar) untuk

⁴² Widisuseno, Iriyanto, 2019. Ketahanan Nasional Dalam Pendekatan Multikulturalisme. Jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

membantu manusia untuk memahami, peduli dan melaksanakan nilai-nilai estetika atau etika inti⁴³. Pendidikan karakter juga dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk menanamkan kecerdasan dalam penghayatan bersikap, berpikir maupun pengalaman dalam bentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah menjadi jati diri. Hal ini dapat diwujudkan melalui interaksi dengan Tuhannya, individu atau diri sendiri, antar sesama manusia maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Pendidikan karakter dapat dipahami sebagai sebuah pendidikan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter kepada seluruh peserta didik. Nilai-nilai luhur dimaksud yaitu kemandirian, kejujuran, kemuliaan sosial, sopan santun sampai dengan kecerdasan berfikir logis⁴⁴. Konsep pendidikan karakter ini sangat berkaitan erat dengan membangun sikap nasionalisme warga negara Indonesia, sebagai pola pendekatan multikulturalisme.

Masih adanya sikap masyarakat mencederai toleransi dan wawasan kebangsaan seperti adanya himbauan untuk tidak menggunakan bahasa daerah dalam forum-forum resmi, adanya pendiskriminasian suatu daerah, adanya indikasi pelecehan terhadap suatu keyakinan budaya masyarakat, menandakan bahwa pendidikan karakter yang selama ini menjadi misi pendidikan nasional, dirasakan belum dapat menyentuh kehidupan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kondisi ini memberikan makna bahwa masyarakat Indonesia belum memahami sebuah kebenaran bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang multikultur. Artinya, kebenaran (koherensi) merupakan salah satu proses yang dapat menunjukkan adanya keadaan yang runut, masuk akal antara satu gagasan dan objek tertentu⁴⁵. Berdasarkan teori ini, multikulturalisme bangsa Indonesia merupakan suatu kebenaran atas dasar pentingnya untuk hidup bertoleransi dan berwawasan kebangsaan.

Berdasarkan data dan fakta serta teori diatas, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pola pendekatan multikulturalisme dalam mengatasi permasalahan ketahanan nasional, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

⁴³ Zubaedi, 2011. Desain Pendidikan Karakter : konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 17

⁴⁴ Ibid, h. 20

⁴⁵ Budisutrisna, 2016. Komparasi Teori Kebenaran (Koherensi) Mo Tzu dan Pancasila : Relevansi Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Indonesia. Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan keyakinan terhadap kebenaran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara di lingkungan para penyelenggara negara, aparatur pemerintah dan warga masyarakat, dilakukan upaya-upaya antara lain :

1) Meningkatkan kualitas pendidikan.

a) Secara konsisten dan konsekuen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional, dapat menetapkan kenaikan alokasi anggaran bidang pendidikan pada APBN yang terus beranjak naik dari tahun ke tahun.

b) Mewajibkan penyampaian materi ajaran tentang pendidikan Pancasila dalam setiap jenjang/strata pendidikan formal maupun non-formal.

c) Menyusun kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila, yang menitikberatkan pada penguatan pemahaman, penghayatan dan keteguhan keyakinan terhadap kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara, pada materi ajaran tertentu seperti kewarganegaraan, moral, etika dan budi pekerti yang berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

d) Lemhannas dapat memprakarsai dilakukannya kursus, penataran, seminar, lokakarya dan sebagainya dengan metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila melalui pendekatan, proses dan aktivitas pembelajaran, serta motivasi, secara persuasif dan tidak indoktriner bagi para penyelenggara negara, aparatur pemerintah, tenaga pendidik, dan warga masyarakat.

2) Menumbuhkan kesadaran akan falsafah hidup Pancasila.

a) Mengangkat citra Pancasila sebagai ideologi negara yang paling sesuai dengan alam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam rangka pembentukan citra ini pemerintah melibatkan seluruh media massa dan elemen masyarakat,

dengan memperhatikan budaya daerah/lokal dan tingkat pendidikan/pengetahuan warga setempat.

b) Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik atau instruktur dalam menyampaikan modul-modul ajaran yang telah disiapkan dalam rangka pemahaman, penghayatan dan keyakinan terhadap Pancasila baik melalui proses belajar mengajar di kelas maupun melalui penataran dan penyuluhan di luar kelas.

3) Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan penataran Pancasila.

a) Melakukan pengkajian atas kekurangan dan kelebihan metoda pendidikan dan penataran Pancasila, di masa lalu untuk diadakan perbaikan dan revisi dalam proses pembelajaran berikutnya.

b) Merespon saran dan kritik dari masyarakat, tentang metoda pendidikan dan penataran Pancasila yang dilaksanakannya, agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika zaman, serta merekomendasikan rumusan hasil kajian tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila, untuk disosialisasikan di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan pengembangan, secara berkelanjutan.

b. Mewujudkan keselarasan antara nilai-nilai praksis dengan nilai-nilai dasar dari Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilakukan upaya-upaya antara lain :

1) Menyelenggarakan konsensus nasional tentang ideologi negara Pancasila, yang melibatkan seluruh unsur dan elemen kehidupan nasional baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, guna menghasilkan kesepakatan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

a) Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara adalah sudah final, sehingga dapat memberikan kekuatan moral dan payung hukum bagi setiap gerakan yang hendak merubah dan atau mengganti rumusan sila-sila Pancasila, yang dapat

membahayakan integritas dan identitas nasional bangsa Indonesia.

b) Proses amandemen I, II, III dan IV UUD 1945 sudah dianggap mencukupi untuk kebutuhan dan tuntutan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, dan menentukan syarat-syarat perubahan konstitusi yang lebih memadai bagi terjaminnya kelestarian nilai-nilai perjuangan para pendiri negara Republik Indonesia.

c) Peraturan perundang-undangan yang menyimpang dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi harus secepatnya direvisi (diamandemen), sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber pada Pancasila sebagai sumber hukum nasional Indonesia.

d) Supremasi hukum harus dapat ditegakkan berlandaskan keadilan, kebenaran, kepastian, dan kejujuran, sehingga nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis Pancasila dapat diamalkan secara konsisten dan konsekuen dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Melakukan penataan kelembagaan dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk menyelaraskan nilai-nilai praksis dengan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai dasar Pancasila:

a) Membumikan peran, tugas dan fungsi BPIP dalam mensosialisasikan kembali nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negara Indonesia, secara berlanjut dan berkesinambungan sesuai dengan paradigma baru.

b) Melakukan koordinasi secara terpadu dengan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah di seluruh Indonesia, guna mempercepat tindak lanjut upaya

peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila kedalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c) Untuk jangka pendek (1 tahun), pemerintah melalui institusi negara yang telah ditetapkan melakukan rekrutmen personil dan penataan organisasi kelembagaan, serta menyiapkan para manggala dan penatar yang dipandang memiliki integritas sebagai tenaga-tenaga fungsional.

d) Untuk jangka menengah (1 s/d 3 tahun), sambil menata organisasi kelembagaan dan rekrutmen personil, merumuskan dan menetapkan modul-modul dan metoda pembelajaran pendidikan Pancasila untuk para penyelenggara negara, aparatur pemerintah maupun warga masyarakat, baik secara langsung terjun ke masyarakat maupun secara tidak langsung melalui dialog interaktif di media massa dan lain sebagainya.

e) Untuk jangka panjang (5 tahun ke atas) mengevaluasi dan mengkaji serta merumuskan kembali modul-modul dan metode-metode pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai kebutuhan dan dinamika zaman.

f) Melalui penataan kelembagaan ini diharapkan ada pengembangan pemikiran terhadap keselarasan nilai-nilai praksis dengan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental Pancasila, dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku keteladanan para pemimpin dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan ketahanan nasional, dilakukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

1) Para pemimpin formal dan informal diharapkan untuk menunjukkan integritas dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban tugas, fungsi dan kedudukannya yang tercermin dari :

- a) Kemampuan menentukan kebijakan dan keputusan yang jernih dan sehat, sesuai hati nuraninya demi bangsa dan negara.
 - b) Kemampuan menempatkan kepentingan nasional, cita-cita dan tujuan nasional di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
 - c) Pola tindak yang bertanggung jawab, sehingga mampu menentukan dan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah.
- 2) Para pemimpin formal dan informal mampu menegakkan kejujuran di dalam dirinya, yang tercermin dari :
- a) Kemampuan untuk tidak melakukan praktek korupsi, dimanapun ia bertugas.
 - b) Kemampuan untuk tidak melakukan praktek kolusi yang merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta tatanan kehidupan yang harmonis.
 - c) Kemampuan untuk tidak melakukan praktik nepotisme yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia.
- 3) Para pemimpin formal dan informal memiliki kemampuan dalam menguasai/memahami budaya universal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak kalah pentingnya memiliki kepribadian dan sosial kemasyarakatan yang tinggi. Hal ini sangat penting kaitannya dengan para pemimpin, dalam mewujudkan sikap dan perilaku keteladanan bagi masyarakat luas.

15. Analisis pementapan peran dari komponen bangsa dalam implementasi toleransi dan wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat. Sikap toleransi dan wawasan kebangsaan sangat penting dimiliki oleh seluruh komponen bangsa. Bahkan bukan hanya sekedar sebagai wawasan pengetahuan, akan tetapi mampu mengimplementasikan toleransi dan wawasan kebangsaan dalam menjalankan fungsinya sebagai abdi negara. Diharapkan dengan pemahaman tentang toleransi dan wawasan kebangsaan oleh para

penyelenggara dan aparat keamanan, maka akan dimiliki orientasi berpikir untuk meningkatkan fungsi dan tugasnya dalam rangka meningkatkan kepentingan nasional. Para penyelenggara negara dan aparat keamanan tidak akan lagi berpikir secara sektoral untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan nasional Indonesia secara bersama-sama. Sehingga akan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Para penyelenggara negara yang memiliki sikap toleransi dan wawasan kebangsaan akan menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Sementara itu bagi aparat keamanan (TNI dan Polri), dengan memiliki sikap toleransi dan wawasan kebangsaan dapat menjalankan tugas pokoknya dengan optimal, minimal konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dapat diminimalisir. Hal ini diakibatkan tinggi dan kuatnya rasa nasionalisme yang semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Demikian juga dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda harus dapat meningkatkan perannya sebagai katalisator (seseorang yang menyebabkan terjadinya perubahan) terwujudnya toleransi dan wawasan kebangsaan di lingkungan masyarakat.

Tepatlah kiranya bila teori *pentahelix* sebagai sebuah metode untuk meningkatkan sinergi antara penyelenggara negara, aparat keamanan dan seluruh komponen bangsa lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah toleransi dan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan ketahanan nasional. Karena Teori *pentahelix* ini sangat bermanfaat untuk berbagai permasalahan yang melibatkan banyak pihak, dimana pemangku kepentingan dapat mewakili berbagai kepentingan di suatu lokasi⁴⁶. Sebagaimana menurut Soemaryani (2016), model *Pentahelix* merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Rampersad, Quester & Troshani (dalam Halibas, Sibyan dan Maat (2017), kolaborasi *Pentahelix* memiliki peran penting untuk bermain didalam mendukung tujuan inovasi bersama sesuai dengan peran dan bidangnya masing-masing. Akademisi (guru, dosen, dll), swasta (instansi swasta), pemerintah (termasuk TNI/Polri), media (cetak, audio, video, online),

⁴⁶ Astuti, Retno Sunu, dkk, 2020. *Collaborative Governance* dalam Perspektif Administrasi Publik, FISIP Undip, Semarang, hal 103

komunitas/ormas (*civil society*). Artinya, peran tersebut sangat strategis untuk membangun sebuah toleransi dan wawasan kebangsaan seluruh komponen bangsa.

Melalui teori *pentahelix* dapat menumbuhkan suatu persepsi yang sama terhadap upaya implementasi toleransi dan wawasan kebangsaan para penyelenggara negara dan aparat keamanan kepada seluruh masyarakat didukung komponen bangsa lainnya. Persepsi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyusun, menafsirkan dan mengenali berbagai informasi sensoris yang dapat memberikan suatu gambaran atau pemahaman tentang suatu lingkungan. Persepsi merupakan suatu proses dimana individu menginterpretasikan dan mengatur kesan-kesan sensoris untuk memberikan arti bagi lingkungan dimana mereka hidup yang berdasarkan pada persepsi mereka tentang suatu kenyataan⁴⁷.

Karena titik temu antara toleransi dan wawasan kebangsaan pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan nasional di segala bidang kehidupan dan memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia menuju bangsa yang demokratis dan modern. Demokratisasi dan modernisasi memerlukan prakondisi berupa adanya sinergitas, kompromi, koordinasi antara penyelenggara negara, aparat keamanan dan seluruh elemen bangsa. Kunci membangun ketahanan nasional menuju bangsa yang demokratis dan modern tersebut bukan terletak pada ada atau tidaknya pemisah antara penyelenggara negara, aparat keamanan dan elemen bangsa. Bagaimana membangun relasi kebersamaan dengan metode *pentahelix* dalam ketatanegaraan merupakan salah satu pilihan historis. Kunci menuju ketahanan nasional yang tangguh terletak pada bagaimana mengembangkan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan dalam konstruksi ketatanegaraan. Konstruksi ketatanegaraan merupakan salah satu situasi dimana penyelenggara negara, aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat menyadari batas otoritasnya lalu mengembangkan konstruksi tersebut sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya. Sehingga, masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan ketahanan nasional bangsa Indonesia menjadi bangsa yang demokratis dan modern.

⁴⁷ Alizamar, 2016. Psikologi Persepsi & Desain Informasi : Sebuah Kajian Psikologis Persepsi dan prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual. Media Akademi, Jogjakarta, h. 14-15.

Oleh karenanya, harus menjadi kesadaran setiap warga bangsa untuk memegang teguh jati diri kebangsaannya, serta loyalitas terhadap perjuangan bangsanya. Dengan adanya kebersamaan antara penyelenggara negara, aparat keamanan dan elemen bangsa lainnya tadi, maka toleransi dan wawasan kebangsaan menjadi norma hidup setiap warga bangsa, baik dalam jangkauan norma logika maupun norma etika. Ketika kedua norma tadi menyatu ke dalam “pribadi” warga bangsa, pasti akan muncul kehendak kuat untuk berkarya memperjuangkan kepentingan bangsanya, yang disebut sebagai semangat kebangsaan. Namun toleransi dan Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari paham, rasa, dan semangat itu tidak akan memberi arti apapun apabila tidak diimplementasikan atau diamalkan ke dalam bentuk perbuatan nyata di setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam membangun bangsa ini, toleransi dan wawasan kebangsaan yang terdiri dari *cipta, rasa, dan karsa* kebangsaan itu saja tidak cukup, karena harus ada *karya* kebangsaan. Termasuk diantaranya adalah *karya* kebangsaan dari penyelenggara negara, aparat keamanan dan elemen bangsa lainnya dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Meningkatkan rasa toleransi dan wawasan kebangsaan bagi seluruh warga negara diperlukan adanya kolaborasi antara penyelenggara negara, aparat keamanan dan elemen bangsa lainnya. Khususnya kepada para generasi muda bangsa yang notabene sebagai calon-calon pemimpin nasional, agar kedepan memiliki sikap toleransi dan wawasan kebangsaan yang tinggi dalam mewujudkan ketahanan nasional. Adapun peran yang dapat dilakukan oleh kolaborasi antara penyelenggara negara dan elemen bangsa lainnya untuk meningkatkan pemahaman toleransi dan wawasan kebangsaan antara lain :

a. **Secara melembaga meningkatkan Penanaman Paham Kebangsaan melalui Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan.**

Lembaga yang berkompeten untuk meningkatkan penanaman paham kebangsaan melalui pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan adalah Kemdikbud Ristek dan mekanisme penanaman paham kebangsaan harus dimulai dari atas ke bawah (*top down*). Oleh sebab itu upaya yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Memberdayakan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan untuk melahirkan sumber daya manusia yang kompeten menjadi tenaga pendidik dan tenaga pembina kewarganegaraan dengan menjadikan mata pelajaran kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib dengan standar nilai baik bagi sarat kelulusan.
- 2) Perguruan Tinggi membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi warga negara yang memiliki minat untuk menekuni pendidikan kewarganegaraan agar kapasitas warga negara yang memiliki wawasan kesadaran bernegara dan semangat perjuangan bangsa sebagai kekuatan mental spiritual terus meningkat. Perguruan Tinggi harus konsisten dengan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu melahirkan warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara, serta nasionalisme yang tinggi.
- 3) Memberdayakan Lembaga Pendidikan sebagai tempat melahirkan sumber daya manusia yang memahami Wawasan Nusantara yaitu sumber daya manusia yang mampu memberdayakan segenap potensi nasional yang menjamin hidup dan kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dibangun keselarasan pemikiran yang disesuaikan dengan situasi kondisi dan konstelasi geografi, demografi dan kondisi sosial bangsa Indonesia.
- 4) Meningkatkan peran lembaga pendidikan sebagai sarana penanaman bela negara yang berperan bukan saja sebagai lembaga yang memberi sertifikasi terhadap pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berperan sebagai pembentuk karakter bangsa termasuk didalamnya pembudayaan bela negara dengan memfasilitasi materi-materi bela negara yang bersifat geografis, psikologis, *security* dan dedikatif serta memfasilitasi sarana prasarana untuk mengaplikasikannya sehingga hasil didik memiliki dimensi yang luas.

5) Merealisasikan kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta dimana didalamnya termuat peranan TNI/Polri dalam penanaman paham kebangsaan dengan mengaktualisasikan kembali materi pendidikan moral Pancasila secara murni dan konsekuen. TNI/Polri sebagai pendukung dan pembela ideologi negara benar-benar diberdayakan untuk memotivasi kemauan dan kemampuan generasi saat ini (mahasiswa) untuk berjuang melembagakan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma, mekanisme dan praktek kehidupan publik hingga akhirnya Pancasila benar-benar terwujud menjadi *working ideology*. Sebagai *working ideology*, Pancasila bukan hanya semata-mata *ruh*, namun memiliki *raga* dalam kehidupan publik. Dengan memiliki *raga* maka Pancasila bukan lagi sesuatu yang abstrak melainkan dirasakan hadir dalam realitas kehidupan sehari-hari. Kehadiran Pancasila dalam keseharian itulah yang akhirnya akan memperkuat legitimasi Pancasila sebagai ideologi yang visioner dan tahan banting. Sebaliknya, Pancasila akan menjadi sebuah ideologi yang beku apabila Pancasila tidak mampu *meraga* dalam kehidupan publik.

b. **Secara melembaga meningkatkan penanaman bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran.**

Agar pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran tidak diprediksi dan dimaknai sebagai proses militerisme, maka upaya yang perlu dilaksanakan adalah :

- 1) Membumikan sosialisasi Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Pasal 9 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa ayat (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Dan (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud Ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib,

pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan Pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan bela negara menjadi penting bagi seluruh warga negara Indonesia, karena sudah merupakan kebutuhan legal dalam rangka menjamin tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa.

2) Melalui lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan juga media massa melakukan sosialisasi tujuan dan makna pelatihan dasar kemiliteran yang lebih aplikatif. Pemerintah perlu apresiatif terhadap dunia usaha yang telah mengembangkan sekolah-sekolah alam dan pariwisata yang menyediakan sarana "outbond" yang telah terbukti banyak menarik minat dan hasilnya positif dan yang terpenting di dalamnya terdapat muatan dasar-dasar kemiliteran. Sebenarnya di negeri ini telah banyak hal-hal yang terkait dengan rasa kebangsaan dan pelatihan dasar kemiliteran, baik berorientasi ke darat, ke perairan, maupun ke udara yang secara langsung maupun tidak langsung sudah memperkenalkan lingkungan hidup dan geografi, misalnya upacara bendera di dasar laut atau di tebing oleh para pencinta alam, namun belum seluruh masyarakat memaknainya.

3) Melalui lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan juga media massa melakukan sosialisasi tujuan dan makna pelatihan dasar kemiliteran yang lebih aplikatif. Di lingkungan aparat keamanan seperti TNI/Polri memang pelatihan dasar kemiliteran telah terbukti dapat menumbuhkan jiwa patriotisme, kebersamaan, soliditas, disiplin, dan yang paling signifikan adalah membangun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apapun. Yang perlu diperhitungkan berapa rasio personel yang ada lingkungan TNI dengan jumlah penduduk sehingga dapat dibuktikan berapa persen yang memahami tujuan dan makna pelatihan dasar kemiliteran. Jika tetap akan menggunakan istilah pelatihan dasar kemiliteran maka diharapkan

adanya suatu gerakan yang dapat mengembangkan cara pandang masyarakat terhadap tujuan dan makna pelatihan dasar kemiliteran tersebut. Kita ketahui bersama bahwa arus globalisasi menciptakan suatu transparansi di semua lini kehidupan, dampak dari itu semua ada kalanya suatu masyarakat secara utuh menyerap informasi tanpa adanya suatu penilaian bahkan dapat dengan mudah merubah tatanan kehidupan dengan mencontoh dari negara lain yang belum tentu cocok dengan budaya maupun kondisi yang ada di negaranya. Namun disisi lain timbulnya sikap kritis dalam melihat berbagai persoalan baik persoalan yang ada di lingkungannya maupun permasalahan bangsa. Masyarakat kini sudah tidak mau lagi di introduktif dengan tindakan maupun sikap yang memang secara universal dianggap salah, masyarakat sudah berani menyampaikan kebenaran, sehingga kalau menghendaki partisipasi masyarakat dalam segala hal, tidak bisa lagi menggunakan cara-cara seperti era sebelumnya, dan apabila masih menggunakan cara seperti itu cepat atau lambat akan dijauhi atau bahkan dasingkan oleh kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Untuk itu perlu meninjau kembali penggunaan istilah pelatihan dasar kemiliteran, juga perlu adanya kejelasan informasi akan makna dan tujuan pelatihan dasar kemiliteran.

c. Secara melembaga meningkatkan penanaman semangat kebangsaan melalui pelaksanaan pengabdian sebagai prajurit TNI/Polri dan sebagai bagian dari komponen bangsa. Untuk meningkatkan kualitas dan ketangguhan bangsa, anak bangsa perlu disadarkan bahwa ancaman sudah didepan mata, bangsa Indonesia hampir-hampir kehilangan arah dan tujuan sehingga perlu adanya suatu paradigma baru terhadap berbagai sistem dan aturan yang berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa agar lebih memiliki kepedulian terhadap sesama anak bangsa dan rela berkorban demi kepentingan yang lebih besar atas dasar semangat kebangsaan yang berkaidah Pancasila

dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu upaya yang perlu dilakukan adalah :

1) Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menjalin kerjasama dengan TNI/Polri untuk menyelenggarakan pendidikan bela negara kepada seluruh lapisan masyarakat. Maka dalam penyelenggaraan pendidikan bela negara yang dilaksanakan harus berpijak pada kebijakan pemerintah. Pemerintah harus konsekuen dengan kebijakannya untuk memfasilitasi kebutuhan Anggaran TNI/Polri secara memadai untuk kegiatan pendidikan, pelatihan instruktur dan pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan bela negara. Disamping itu pimpinan TNI/Polri meningkatkan kinerja seluruh aparat TNI/Polri untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bela negara secara aman dengan :

a) Memberikan pembekalan moral dan spiritual agar tugas yang diembankan benar-benar dipahami sebagai suatu kepercayaan. Pembekalan tersebut pada intinya pembekalan untuk mengimplementasikan konsep sistem pertahanan semesta sebagai doktrin nasional dalam menyelenggarakan pertahanan negara yang berpedoman kepada prinsip kerakyatan, kewilayahan dan kesemestaan dalam sistem pertahanan semesta agar melembaga dalam kehidupan masyarakat di daerah.

b) Memberdayakan Komando Kewilayahan (Kowil) bersama dengan Polres sebagai komando pelaksana tugas dan fungsi ketahanan daerah bersama pemerintah daerah merencanakan dan menyusun rencana pembinaan, pengembangan dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional melalui penyelenggaraan pertahanan di wilayah, sosialisasi bela negara kepada seluruh masyarakat secara formal dan informal.

c) Memelihara dan meningkatkan soliditas dan solidaritas sesama prajurit TNI/Polri dan penyelenggara negara di daerah, dengan tetap mengikuti perkembangan dan melakukan penajaman analisa situasi, agar senantiasa siap sedia dan tidak terdadak oleh perubahan cepat yang setiap saat dapat terjadi, serta memantapkan kepemimpinan lapangan.

2) Memfasilitasi kebijakan untuk bela negara melalui penyiapan komponen cadangan pada setiap individu maupun organisasi sesuai profesi. Dalam kebijakan tersebut harus dibuat jelas pengertian mengenai bela negara dan juga pengertian tentang hak serta kewajiban bela negara yang melekat pada setiap profesi.

d. **Secara melembaga meningkatkan Penanaman Semangat Ke-Bhineka Tunggal Ika-an.** Semangat ke-Bhineka Tunggal Ika-an merupakan penjelmaan dari konsep Wawasan Nusantara sebagai embrio dari paham, rasa dan semangat kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan kesadaran bela negara. Oleh sebab itu untuk meningkatkan penanaman semangat ke-bhineka tunggal ika-an tersebut dapat dilaksanakan pada aspek *Ipoleksosbudhankam*, yaitu:

1) Dalam Aspek Ideologi. Penyelenggara negara, aparat keamanan dan seluruh elemen bangsa dalam menanamkan ideologi negara, harus satu kata, satu komitmen dan satu tindakan dalam menjunjung ideologi Pancasila. Sejak dini ditanamkan bahwa bangsa dan negara Indonesia selama masih berdiri tidak akan pernah mengganti ideologi Pancasila dengan Ideologi yang lain. Sehingga tidak memberi ruang bagi pihak yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Indonesia harus banyak belajar dari negara-negara lain. Sebagai ilustrasi, negara Amerika yang dinilai sebagian besar bangsa Indonesia sebagai negara yang memaksakan kehendaknya terhadap bangsa lain untuk kepentingan nasionalnya, justru memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap ideologi

liberalisme yang dianutnya, bahkan membumikannya ke seluruh dunia untuk menjadi pengikutnya. Sebagai warga negara yang ingin dilindungi hak dan kewajibannya secara sama, harus berpedoman pada ideologi yang sama, yaitu Pancasila.

2) Dalam Aspek Politik. Organisasi partai politik sebagai organisasi yang paling berkompeten di bidang politik harus konsisten dalam mengaktualisasikan komitmen sistem pertahanan semesta melalui jalur politik. Banyaknya partai politik harus dapat diintegrasikan, dimana sejak pembentukan organisasi harus digariskan bahwa adanya kebebasan untuk mendirikan organisasi politik diikat oleh satu kata dan satu komitmen bahwa setiap organisasi harus menjadikan Demokrasi Pancasila sebagai satu-satunya sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Kemudian implementasi dari komitmen satu tindakan, maka setiap organisasi politik harus mengusung dan mensosialisasikan Demokrasi Pancasila dengan metoda dan cara masing-masing kepada berbagai kalangan masyarakat. Sehingga setiap anggota partai politik memiliki tanggung jawab atas kepemimpinannya dalam memberikan pembekalan tentang Demokrasi Pancasila. Dengan semakin banyak cara dan metoda yang dikembang organisasi partai politik untuk menuju demokrasi Pancasila, maka semakin aplikatif upaya mengokohkan Demokrasi Pancasila.

3) Dalam Aspek Ekonomi. Para penyelenggara negara, aparat keamanan dan seluruh elemen bangsa harus bersama-sama berkomitmen untuk menanamkan kepribadian yang "cinta buatan Indonesia" dan "pola hidup sederhana" secara nyata (bukan slogan). Melalui tangan-tangan mereka negara Indonesia yang kaya akan sumber daya manusia dan kaya dengan sumber daya alam ini harus bisa dijadikan sebagai menara penguasa. Indonesia telah memiliki suatu sistem perekonomian yang handal yaitu ekonomi kerakyatan, dimana potensinya banyak dan konsumennya juga banyak,

sehingga tidak perlu terlampau berambisi untuk berkompetisi di pasar global. Yang terpenting pemerintah memfasilitasi produktivitas rakyat Indonesia untuk mengembangkan perekonomian kerakyatan yang akan dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Contoh satu kata, satu komitmen dan satu tindakan nyata adalah dengan pembudayaan penggunaan pakaian batik satu kali dalam satu minggu saja sudah dapat memajukan perindustrian tekstil, belum jika ada penyeragaman penggunaan sepatu hitam buatan Indonesia baik di lingkungan pekerjaan maupun pendidikan dan masih banyak yang lainnya termasuk kebutuhan pangan dimana masyarakat Indonesia dapat dijadikan konsumen besar bagi produk bangsanya sendiri untuk mengikis sifat individualistis dan sifat konsumerisme.

4) Dalam Aspek Sosial Budaya. Membuat program silang untuk membangun kesetaraan dan keadilan dengan memahami kelemahan pembangunan aspek sosial budaya yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun penghidupan yang ketiganya saling keterkaitan. Sementara itu, selain dengan program membebaskan biaya mendapat pendidikan dan kesehatan, maka dibutuhkan tenaga pendidik dan komponen pendidikan lainnya yang memadai. Contoh solusi sederhana, Pemerintah mengatur sistem penugasan tenaga pendidik dengan program silang tugas. Tugaskan tenaga pendidik yang profesional di daerah terbelakang, terpencil dan perbatasan, bukan menugaskan tenaga pendidik yang baru. Justru tenaga-tenaga baru yang harus berjuang di lembaga pendidikan yang sudah maju agar tertantang dengan kemampuan siswa-siswa yang berkualitas. Untuk tahap awal mungkin akan ada suatu pergeseran, namun pada tahap selanjutnya akan didapat keseimbangan. Di ujung daerah terbelakang sana akan muncul anak-anak bangsa yang terdidik oleh guru yang profesional. Proses keseimbangan melalui program silang tugas di berbagai bidang profesi akan menyamakan langkah, sikap dan pikiran demi satu tujuan guna

mewujudkan cita-cita "sumpah pemuda" sebagai kekuatan kultur sosial bangsa.

5) Aspek Pertahanan dan Keamanan. Anak bangsa yang telah dibina dengan berbagai pendidikan dan latihan baik di lingkungan TNI maupun Polri adalah andalan bangsa untuk melembagakan wawasan kebangsaan. Mereka adalah sumber daya manusia yang telah disamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindaknya dalam mengamankan dan mengawal bangsa. Idealnya dapat dijadikan tauladan bagi masyarakat lainnya. Oleh sebab itu untuk masalah pertahanan, walaupun dalam paradigma nasional merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, namun eksistensi, kredibilitas dan profesionalisme TNI perlu terus diupayakan.



BAB IV PENUTUP

16. **Simpulan.**

Dari uraian bab per bab yang telah disampaikan diatas, pemantapan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan merupakan langkah paling strategis dan penting untuk mendukung ketahanan nasional. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa saat ini sikap intoleransi yang ditunjukkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, merupakan suatu ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta mengindikasikan bahwa wawasan kebangsaan masyarakat mulai menurun. Untuk dapat menjawab segala permasalahan yang ditemukan, dapat disampaikan simpulan sebagai berikut :

- a. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, baik etnis, agama, budaya maupun bahasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemajemukan bangsa Indonesia merupakan tiang penyangga kokohnya persatuan dan kesatuan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Sedangkan untuk menyatukan kemajemukan itu sendiri dibutuhkan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan dari seluruh elemen bangsa. Dimana kedua sikap ini menjadi salah satu kunci meningkatnya ketahanan nasional bangsa Indonesia disegala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, dari data-data yang ditemukan saat ini pemahaman masyarakat bangsa Indonesia terhadap makna dan implementasi toleransi maupun wawasan kebangsaan mulai memudar. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan terhadap pola pikir, pola sikap dan pola tindak dari sebagian masyarakat Indonesia terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara yang telah ditunjukkan oleh para pendiri bangsa ini. Bahkan dari penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset nasional terdapat 10 kota dari 94 kota yang dijadikan sebagai subjek penelitian, mengalami degradasi toleransi dan wawasan kebangsaan. Kondisi demikian, tentunya akan mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa secara umum. Untuk itu, diperlukan pembudayaan dan

pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila serta meningkatkan pengembangan penghayatan maupun pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat berhasil dengan optimal apabila pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya maupun dengan meningkatkan peran BPIP secara lebih massif untuk terus memberikan penyuluhan atau pembudayaan nilai-nilai Pancasila terhadap seluruh elemen masyarakat.

b. Berkaitan dengan intoleransi dan lunturnya wawasan kebangsaan, kasus-kasus terbaru yang berkaitan dengan multikulturalisme diantaranya adanya himbauan tidak boleh menggunakan bahasa daerah dalam forum-forum resmi oleh anggota legislatif, adanya pendiskriminasian salah satu daerah dan adanya indikasi pelecehan terhadap keyakinan suatu agama di wilayah bencana, telah menimbulkan gejolak dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan mental dan moral bangsa yang pada waktu beberapa dekade ke belakang terkenal dengan masyarakat yang memiliki sopan santun dan memiliki akhlak mulia, menjadi tergerus oleh perkembangan lingkungan global yang masuk ke dalam lingkungan kehidupan bangsa Indonesia. Maka perlu dipertanyakan pola pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, baik melalui kebijakan maupun melalui penanganan secara langsung oleh aparat negara, seperti kepolisian, kejaksaan dan TNI. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang mendapatkan legitimasi untuk mengatur negara, telah diberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengambil sebuah kebijakan yang dapat mewujudkan pemantapan toleransi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peningkatan pemahaman, penghayatan dan keyakinan terhadap kebenaran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara di lingkungan para penyelenggara negara, aparatur pemerintah dan warga masyarakat, mewujudkan keselarasan antara nilai-nilai praksis dengan nilai-nilai dasar dari Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkembangkan sikap dan perilaku keteladanan para pemimpin

dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan ketahanan nasional.

c. Munculnya sikap intoleransi dan luntarnya wawasan kebangsaan ini juga ditengarai oleh kurang optimalnya peran dari penyelenggara negara dan aparat keamanan beserta komponen bangsa lainnya dalam mengimplementasikan toleransi dan wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat secara luas. Sebagai contoh adalah adanya pernyataan yang inkonstitusional dari penyelenggara negara terkait dengan pembatalan Pemilu 2024. Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai penafsiran negatif di kalangan masyarakat secara luas, bahkan memicu konflik. Demikian juga dalam tubuh TNI maupun Polri, dimana perannya masih kurang memberikan kontribusi terhadap implementasi toleransi dan wawasan kebangsaan. Banyak oknum prajurit TNI dan Polri yang melanggar sumpahnya sebagai aparat negara dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga banyak anggapan dari masyarakat bahwa kedua institusi ini hanya memihak kepada pemerintah sebagai penguasa, daripada membela masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kolaborasi antara penyelenggara negara, aparat keamanan dan elemen bangsa lainnya. Dimana secara melembaga meningkatkan penanaman paham kebangsaan melalui pendidikan kewarganegaraan, meningkatkan pelatihan dasar kemiliteran dalam membentuk rasa nasionalisme serta meningkatkan semangat kebangsaan melalui pengabdian sebagai penyelenggara negara maupun aparat keamanan (prajurit TNI/Polri) sebagai profesi yang sebesar-besarnya merupakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sehingga dapat dijadikan sebagai contoh atau suri tauladan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia secara umum.

17. Rekomendasi

Dengan memperhatikan masih banyaknya kasus-kasus intoleransi dan terdegradasinya wawasan kebangsaan, maka diharapkan pemerintah merumuskan suatu kebijakan yang tepat agar mampu mengakomodir seluruh

kepentingan agar pemantapan toleransi dan wawasan kebangsaan guna mewujudkan ketahanan nasional dapat lebih optimal. Berkaitan dengan hal ini, maka disampaikan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, diantaranya:

a. Presiden dan DPR RI didukung oleh elite politik lainnya, perlu merumuskan perundang-undangan yang mengatur pelestarian Pancasila dan merumuskan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan hukum terhadap oknum-oknum yang berucap, bertindak, menyebarkan sampai dengan mengajak ke arah intoleransi. Karena selama ini, peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk melakukan penegakkan hukum terhadap oknum-oknum tersebut kurang relevan, misalnya yang digunakan adalah UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE (yang telah direvisi tahun 2021 lalu). Karena selama ini oknum-oknum yang menyebarkan dan mengajak ke arah intoleransi tidak mendapat hukuman pidana sesuai undang-undang. Maka dengan adanya undang-undang yang baru tentang pelestarian Pancasila, diharapkan hukum dapat ditegakkan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa ada pengecualian, namun tetap berasaskan kepada keadilan. Perundang-undangan ini diharapkan dapat diuji cobakan pada tahun 2023 dan pelaksanaannya pada tahun 2024 mendatang, mengingat bangsa Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yaitu Pemilu dan Pemilukada secara serentak. Dimana pengalaman pada setiap perhelatan pesta demokrasi terjadi terjadi pengkotak-kotakan dalam lingkungan masyarakat.

b. Presiden dengan segala kewenangannya, perlu membuat Peraturan Presiden untuk membentuk BPIP diseluruh wilayah Indonesia sampai dengan tingkat Kab/Kota sebagai kepanjangan tangan BPIP Pusat dalam rangka memantapkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar BPIP dapat menjadi salah satu badan nasional yang mengkoordinasikan pemantapan dan penyuluhan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Peraturan Presiden ini dapat diuji coba pada tahun 2023 dan pelaksanaannya secara menyeluruh pada tahun 2024 mendatang.

c. Dirjen Pothan Kemenhan RI melalui Dirjen Bela Negara membuat MoU dengan K/L dalam rangka membuat program-program pelestarian, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila yang sasarannya ditujukan mulai dari lembaga pendidikan, instansi pemerintah/swasta dan lingkungan masyarakat pada umumnya. Uji coba MoU tersebut dapat dilakukan pada kuartal ke-4 tahun 2022 ini dan pelaksanaannya secara menyeluruh dapat dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Alizamar, 2016. Psikologi Persepsi & Desain Informasi : Sebuah Kajian Psikologis Persepsi dan prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual. Media Akademi, Yogyakarta
- Astuti, Retno Sunu, dkk, 2020. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik, FISIP Undip, Semarang
- BPPK, 2017. Bahan Belajar Mandiri Wawasan Kebangsaan. Pusdiklat PSDM, Kemenkeu RI
- Faisal H. Basri, 2005. Krisis Ekonomi di tengah gelombang globalisasi Implikasinya bagi kerjasama Ekonomi di Asia Pasifik, Jakarta, Gramedia
- Fachrudin, Achmad, 2021. Konflik Politik Identitas : Pergumulan Politik, Agama dan Media Dari Pilkada DKI 2017 hingga Pilpres 2019. Jakarta : Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo).
- Kemenhan RI, 2014. Doktrin Pertahanan Negara
- Kemenag RI, 2019. Moderasi Agama. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Kemenko Polhukam RI, 2016. Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Lemhannas RI, 2022. Modul Ketahanan Nasional
- Maleong, Lexy, 2014. Metode Penelitian kualitatif. Bandung
- Menkopolhukam RI, 2016. Wawasan Kebangsaan Dalam Bentuk tanya Jawab, Jakarta
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSK), Kemendikbud RI, 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Toleransi di Indonesia
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung; Alfabeta
- Taruna, Handoko (PLT. Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri), 2022. Peta Konflik Sosial di daerah, Disampaikan pada pelatihan peningkatan kepemimpinan perempuan perdamaian pada tanggal 28 Maret 2022
- Zubaedi, 2011. Desain Pendidikan Karakter : konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan. Jakarta, Kencana Prenada Media Group

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang RI No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Pasal 1 angka (2)

JURNAL

Aji, Aditya Purnama, 2021. Bingkai Pemberitaan Tirto.id dan Suara.com tentang Konflik Antara Mahasiswa Papua dan Masyarakat lokal di Surabaya tahun 2019. Jurnal Audiens Vo. 2 No. 1, Maret 2021

Ardipandanto, Aryojati, 2020. Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019 : Perspektif Populisme. Jurnal Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI

Azhari, Subhi. 2021. Peta Kuasa Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia (Laporan Studi Literatur)

Budisutrisna, 2016. Komparasi Teori Kebenaran (Koherensi) Mo Tzu dan Pancasila : Relevansi Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Indonesia. Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Kementerian Agama RI, Toleransi di Kalangan generasi Milenial, Artikel populer Januari 2021

Rusdi, Muhamad, 2021. Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta

Widisuseno, Iriyanto, 2019. Ketahanan Nasional Dalam Pendekatan Multikulturalisme. Jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

INTERNET

Cnbcindonesia, Indeks Demokrasi RI Melesat ke Peringkat 52 Dunia, diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2022/01/31/320/2540729/10-negara-dengan-ekonomi-terbesar-dunia-indonesia-nomor-berapa?page=2> pada 17 April 2022

Cnnindonesia.com. Polemik Wajib Jilbab Padang, Perda Intoleran Didesak Dicabut, diunduh melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128063022-20-599326/polemik-wajib-jilbab-padang-perda-intoleran-didesak-dicabut> pada 10 Februari 2022

- Cnnindonesia.com. Pria Tendang Sesajen Semeru Resahkan Warga, Kini Diburu Aparat, diunduh melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220110071518-12-744490/pria-tendang-sesajen-semeru-resahkan-warga-kini-diburu-aparat> pada 10 Februari 2022
- Fernandes, Arya, 2018. Politik Identitas dalam Pemilu 2019 : Proyeksi dan Efektivitas. Jakarta : Center for Strategic and International Studies (CSIS), diakses melalui <https://www.csis.or.id/publications/politik-identitas-dalam-pemilu-2019-proyeksi-dan-efektivitas/> pada 10 Juni 2022
- Kemendagri. 273 juta penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri, diakses melalui <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri#:~:text=Jakarta%20%20Kemendagri%20melalui%20Direktorat%20Jenderal,Indonesia%20adalah%20273.879.750%20jiwa>. Pada 1 April 2022
- Kesabngpol.bantenprov, 2019. Wawasan Kebangsaan 94 Konsensus Dasar Berbangsa dan bernegara), diakses melalui <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-ideologi-dan-wawas.html> pada 24 April 2022
- Kominfo.go.id. Ada 800.000 Situs Penyebar Hoaxs di Indonesia, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media pada 10 Juni 2022
- Kompas.com. 100 Hari Kudeta Myamar : Rangkuma Peristiwa dan Perkembangan terkini, diakses melalui <https://www.kompas.com/global/read/2021/05/10/121633970/100-hari-kudeta-myanmar-rangkuman-peristiwa-dan-perkembangan-terkini?page=all> pada 1 April 2022
- Kumparannews.com. Intoleransi Agama Jadi Wabah Global, Tak Cuma di Indonesia, diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/intoleransi-agama-jadi-wabah-global-tak-cuma-di-indonesia/2> pada 20 Maret 2022
- News.detik.com. Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 : Bunyi dan Implementasinya, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5491922/pasal-29-ayat-2-uid-1945--bunyi-dan-implementasinya> pada 24 April 2022
- Republika.com. Indonesia dan Dampak individualisme, diakses melalui <https://retizen.republika.co.id/posts/44406/indonesia-dan-dampak-individualisme> pada 1 April 2022
- Setara Institute, 2021

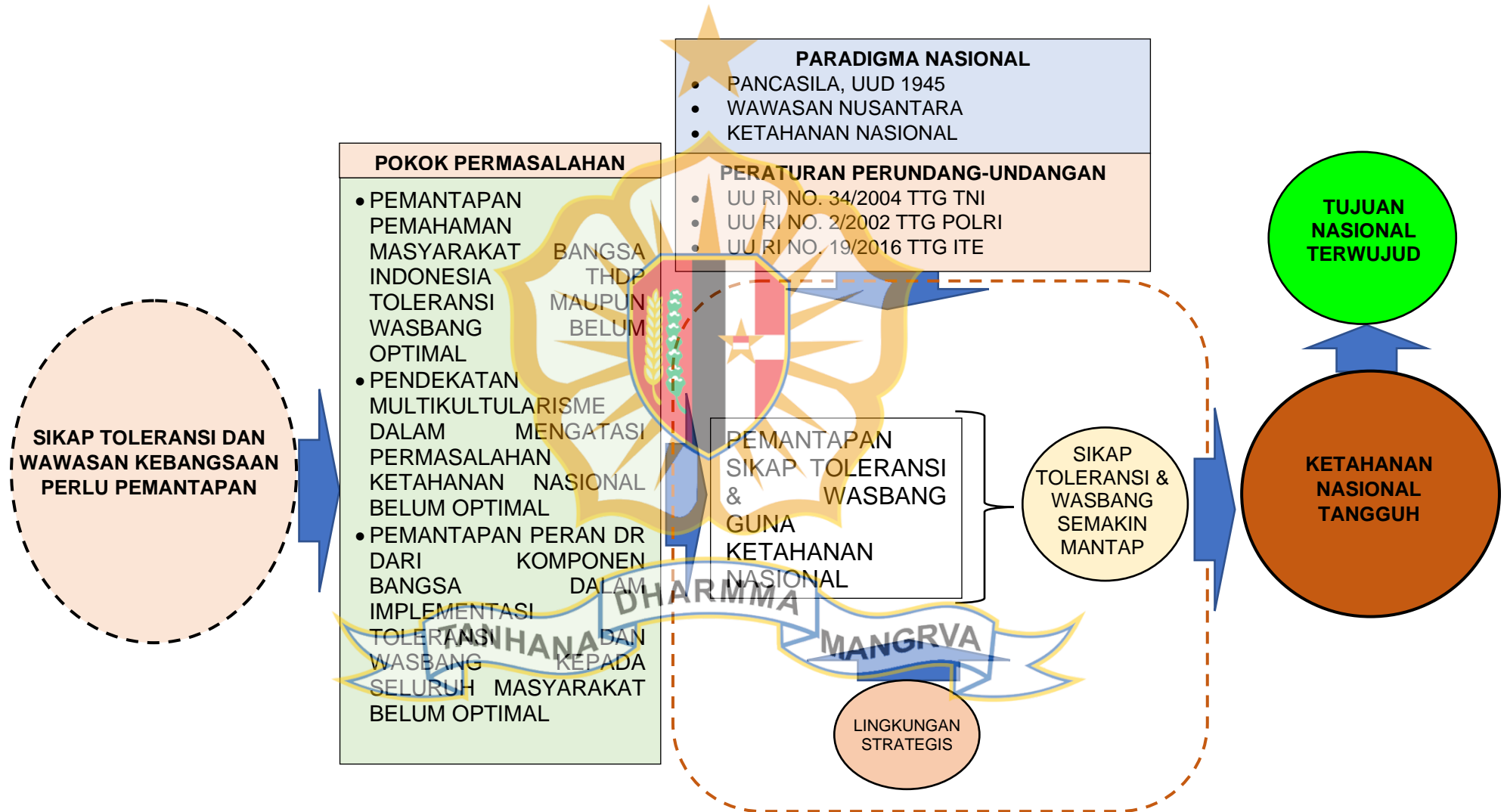
Tempo.com. Sejarah Kekerasan Terhadap Etnis Uighur di Xinjiang, diakses melalui <https://dunia.tempo.co/read/1287193/sejarah-kekerasan-terhadap-etnis-uighur-di-xinjiang> pada 1 April 2022

Wahidfoundation.org. Yani Wahid : Intoleransi dan radikalisme Masih Jadi PR Pemerintah Mendatang, diakses melalui <https://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Yenny-Wahid-Intoleransi-dan-Radikalisme-Masih-Jadi-PR-Pemerintahan-Mendatang> pada 10 Juni 2022



ALUR PIKIR

PEMANTAPAN SIKAP TOLERANSI DAN WAWASAN KEBANGSAAN GUNA KETAHANAN NASIONAL



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA POKOK

1. NAMA : YUNARDI
2. PANGKAT/KORP/NRP : KOLONEL INF/11930073800170
3. JABATAN TERAKHIR : PAMEN DENMA MABESAD
4. TANGGAL LAHIR : 02-01-1970
5. TEMPAT LAHIR : BANDUNG
6. AGAMA : ISLAM
7. GOLONGAN DARAH : O

PENDIDIKAN

a. PENDIDIKAN UMUM

- | | | | |
|----|---------------|-------|------|
| 1) | SEKOLAH DASAR | TAHUN | 1983 |
| 2) | SMP | TAHUN | 1986 |
| 3) | SMA | TAHUN | 1989 |

b. PENDIDIKAN MILITER

- | | | | |
|----|-------------------------|-------|------|
| 1) | DIKBANGUM | | |
| a) | AKMIL | TAHUN | 1993 |
| b) | SUSSARCAB INF | TAHUN | 1994 |
| c) | SUSLAPA INF | TAHUN | 2002 |
| d) | SESKOAD | TAHUN | 2009 |
| e) | PPRA LXIII LEMHANNAS RI | TAHUN | 2022 |
| 2) | DIKBANGSPES | | |
| a) | SUSDANKI | TAHUN | 2002 |
| b) | PEMBEKALAN DANDIM | TAHUN | 2011 |

RIWAYAT JABATAN

a.	DANTON-2/D YONIF-126/KC	TAHUN	1995
b.	DANTON-2/C YONIF-126/KC	TAHUN	1997
c.	PASI-2/OPS YONIF-126 REM-022	TAHUN	1997
d.	DANKIBANT YONIF 126/KC REM 022	TAHUN	1998
e.	DANRAMIL 07 DIM 0207 REM 022	TAHUN	1998
f.	DANDENMA BRIGIF-6/2 KOSTRAD	TAHUN	2002
g.	KASI-3/PERS BRIGIF-6/2 KOSTRAD	TAHUN	2003
h.	WADAN YONIF 413/6/2 KOSTRAD	TAHUN	2003
i.	PAMEN KOSTRAD (DIK SESKOAD)	TAHUN	2009
j.	PABANDYA BINKAR SPERSDAM IM	TAHUN	2009
k.	DANDODIKLATPUR RINDAM IM	TAHUN	2010
l.	DANDIM 0116/NAGAN RAYA REM 012/TU DAM IM	TAHUN	2011
m.	WAASPERS DAM IM	TAHUN	2013
n.	ASPERS KASDAM IM	TAHUN	2015
o.	DIRBINLITBANG PUSSENIF KODIKLAT TNI AD	TAHUN	2017
p.	STAF AHLI PANGDAM IM BID IDPOL	TAHUN	2018
r.	KABINTAL KOSTRAD	TAHUN	2020
s.	PABAN II/MINANEV SPERSAD	TAHUN	2021
t.	PAMEN DENMA MABESSAD	TAHUN	2022

RIWAYAT PENUGASAN

1.	DALAM NEGERI		
a.	OPERASI JARING MERAH	TAHUN	1995
b.	OPERASI JARING MERAH	TAHUN	1997
c.	OPERASI ACEH	TAHUN	2005

2. LUAR NEGERI.

-

DATA KELUARGA

1. NAMA LENGKAP ISTRI : LAILA MARTAROSA
2. JUMLAH ANAK : 3 (TIGA)

